



Dokumen Perencanaan Tahunan

RANCANGAN AKHIR RENJA BAPPERIDA TA. 2025



Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Tahun Anggaran 2025

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET
DAN INOVASI DAERAH (BAPPERIDA)
TAHUN 2024

@subbagianperencanaankeunga



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Nya, atas taufiq, hidayah dan karunianya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rancangan akhir Rencana Kerja (Ranhir) Renja Bapperida Kabupaten Balangan Tahun 2025 dapat dilaksanakan.

Dokumen Rancangan akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana di mutakhirkan trakhir melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021

Penyusunan Dokumen ini merupakan acuan perencanaan perangkat daerah Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan untuk 1 (satu) tahun merupakan penjabaran tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja)

Rancangan Akhir Rencana Kerja Bapperida tahun 2025 tidak terlepas dari Renstra Bappedalitbang 2021-2026 dan tahun kedua RPJMD 2021-2026. Rancangan akhir Rencana Kerja Bapperida ini diharapkan dapat benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan Bapperida tahun 2025 mendatang.

Akhir kata, semoga dokumen ini bermanfaat serta dapat di gunakan sebagai acuan perencanaan perangkat daerah oleh seluruh aparatur Bapperida Kabupaten Balangan dan Bahan Evaluasi demi peningkatan kinerja dan pelayanan pada tahun – tahun mendatang Kami menyadari bahwa dokumen ini masih belum sempurna

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Paringin, Januari 2024

**Kepala Bapperida
Kabupaten Balangan,**

**H. Rakhmadi Yusni, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 197012071995031002**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	5
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	6
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	9
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	32
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	35
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	39
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	41
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	43
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	43
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH	49
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN	51
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	54
BAB V. PENUTUP	56



DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

Tabel 1. Realisasi Keuangan Program Kegiatan dan Subkegiatan Bappedalitbang Balangan Berdasarkan Anggaran Tahun 2023.....	11
Tabel 2. Raelisasi Keuangan Program Kegiatan dan Subkegiatan Bapperida Balangan Berdasarkan Anggaran Belanja Langsung Tahun 2024	32





PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDALITBANG)

Jl. A. Yani Km.4,3 Kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan 71662
Telp. (0526) 2028788 Fax. (0526) 2029504

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI
DAERAH KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN
ENOVASI DAERAH
(BAPPERIDA)
KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BAPPERIDA KABUPATEN BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas : RPJPD; RPJMD; Renstra SKPD; RKPD; dan Renja SKPD;
- b. bahwa untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA), perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Enovasi Daerah Tahun 2024, perlu ditetapkan dengan surat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ((Lembaran Negara RI Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021 – 2026.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana Perubahan Ketiga Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 23).
- 12.** Peraturan Bupati Balangan Nomor 57 tahun 2017 tentang tugas pokok dan uraian tugas unsur-unsur organisasi Badan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten balangan.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KE SATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024 disusun dengan berpedoman pada Dokumen Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan;
- KE DUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Menyusun RENJA Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah dengan mengacu pada Permendagri 86 tahun 2017 secara baik dan tepat waktu.
 2. Mengkonsultasikan hal – hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kepada Tim Penyusun.
 3. Melaporkan Kemajuan dan hasil pekerjaan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah.
- KE TIGA : Susunan Tim Penyusun RENJA Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah tahun 2024 tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KE EMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Balangan tahun 2024
- KE LIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Paringin
Pada tanggal : _____ 2024

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Riset dan Inovasi
Daerah Kabupaten Balangan,

H. Rakhmadi Yusni, S.Sos.M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 197012071995031002

Lampiran Keputusan Kepala BAPPERIDA
kabupaten Balangan
Nomor : /SK/Bapperida-
BLG/2024 Tanggal : 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN
INOVASI DAERAH, KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024

No.	Nama /NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	<u>Rakhmadi Yusni ,S.Sos.M.AP</u> NIP. 197012071995031002	Kepala Badan Pembangunan Riset dan Enovasi Daerah	Ketua
2.	Rifaini Noor,S.Sos.MM NIP. 198612162010011014	Kasubbag Perencanaan	Sekretaris
3.	Hayati,SE NIP. 19810606 201001 2 030	Kasubbag. Keuangan	Anggota
4.	Nanang Asari,ST NIP.198208302009041004	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian &Evaluasi Pembangunan Daerah	Anggota
5.	Moh.Sulistiyo,SE.M.Si NIP.198609012010011009	Kepala BidangKoordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	Anggota
6.	Hariyanto,S.Sos,M.IP NIP. 198211232006041005	Kepala Bidang Koordinasi dan Sikronisasi Perencanaan Ekonomi & Infrastruktur	Anggota
7.	Resty Fauriana,ST,MT NIP. 198204172006041005	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Enovasi Daerah	Anggota

Ditetapkan di: Paringin
Pada tanggal : _____ 2024

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Riset dan
Inovasi Daerah Kab. Balangan

H. Rakhmadi Yusni ,S.Sos.M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 197012071995031002



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDALITBANG)

Jl. A. Yani Km.4,3 Kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan 71662
Telp. (0526) 2028788 Fax. (0526) 2029504

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN
INOVASI DAERAH KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN ENOVASI DAERAH,
(BAPPERIDA)
KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BAPPERIDA KABUPATEN BALANGAN,

- Menimbang : 1. bahwa sesuai dengan Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas: RPJPD; RPJMD; Renstra SKPD; RKPD; dan Renja SKPD;
2. bahwa penyusunan Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Bahwa berkenaan dengan maksud pada poin (1) dan (2) di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Bapperida Kabupaten Balangan tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Enovasi Daerah, (BAPPERIDA) Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ((Lembaran Negara RI Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah

Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor tahun 2022 tentang RPJMD kabupaten Balangan Tahun 2021 – 2026.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana Perubahan Ketiga Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasidan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 23).
17. Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan.

Memperhatikan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN ENOVASI DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN ENOVASI DAERAH, KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2024;**

KE SATU : Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024 disusun dengan berpedoman pada Dokumen Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan;

KE DUA : Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - SKPD setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta PrioritasPlafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2023;

KE TIGA : Sistematika RENJA Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024, meliputi:

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun 2023
- Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- Bab IV : Penutup

KE EMPAT : Dokumen Renja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024 merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.;

KE LIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Paringin
Pada tanggal : _____ 2024

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Riset dan Inovasi
Daerah Kabupaten Balangan,

H. Rakhmadi Yusni, S.Sos.M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19701207 199503 1 002

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN ENOVASI
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Rancangan renja SKPD dibahas pada forum SKPD yang dikoordinasikan oleh Bappedalitbang dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka sinergi



pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD. Renja SKPD ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Bappedalitbang. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun $n+1$.

Pada tahun 2024 Bappedalitbang berubah nama menjadi Bapperida. Sesuai amanat tersebut maka Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah disingkat Bapperida. Kabupaten Balangan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2024 ini menyusun Rancangan Akhir Renja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Balangan tahun 2025. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAPPERIDA Kabupaten Balangan berkiprah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021 sebagaimana Perubahan Ketiga Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 23). Sebagai Lembaga teknis yang berbentuk **Badan Daerah**, Bapperida melaksanakan salah satu tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah. Bapperida mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah.



Badan Perencanaan Pembangunan riset dan inovasi Daerah dalam melaksanakan fungsi tersebut, dapat diuraikan dalam beberapa hal berikut ini :

1. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan riset dan inovasi daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan riset dan inovasi daerah;
3. Pemantauan, Evalausi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan riset dan inovasi daerah;
4. Pembinaan teknis perencanaan pembangunan riset dan inovasi daerah;
5. Pelaksanaan administrasi badan ;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021 – 2026 dan mencapai tujuan Renstra Bapperida pada tahun perencanaan,maka disusunlah Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

1.2 LANDASAN HUKUM

1.2.1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

1.2.2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 1.2.3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4438);
- 1.2.4 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 1.2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 1.2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 1.2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
- 1.2.8 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
- 1.2.9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 1.2.10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 1.2.11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pemerintah Daerah.

- 1.2.12 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025.
- 1.2.13 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 06 tahun 2011 tentang RPJMD kabupaten Balangan Tahun 2011 – 2015.
- 1.2.14 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
- 1.2.15 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana Perubahan Ketiga Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 23).
- 1.2.16 Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Unsur–Unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan.
- 1.2.17 Peraturan Bupati No. 25 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Unsur–Unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan.
- 1.2.18 Kemendagri No. 900.1.155-1317 Tahun 2023 Tentang : Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050 – 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kode fikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 1.2.19 Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2023 Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah



1.2.20 Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 Tentang :
Kedudukan, Susunan ORganisasi, Tugas , Fungsi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah.



1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rancangan Akhir (Ranhir Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program kegiatan dan subkegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024
- 1.3.2 Mengakomodir aspirasi, usulan serta kehendak para pemangku kepentingan (*stakeholders*) bidang Perencanaan pembangunan daerah, dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Perencanaan pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

Sedangkan tujuan umum penyusunan Rancangan Awal (Ranhir Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan tahun anggaran 2025 ;

1. Menjadi pedoman dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2025;
2. Menjadi acuan dokumen referensi dalam penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan agar dapat lebih terarah, tepat sasaran, berdayaguna dan berhasil guna dengan mengedepankan prinsip-prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Ranhir Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Dokumen Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dan Sistematika penulisan Ranhir Renja SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai berikut:



BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja SKPD yang meliputi:

1.1 Latar belakang

1.2 Landasan Hukum,

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan capaian renstra SKPD,

memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis kinerja pelayanan SKPD,

berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD,

berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional, Tantangan dan peluang serta Formulasi isu -isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk

ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya .

BAB V PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun

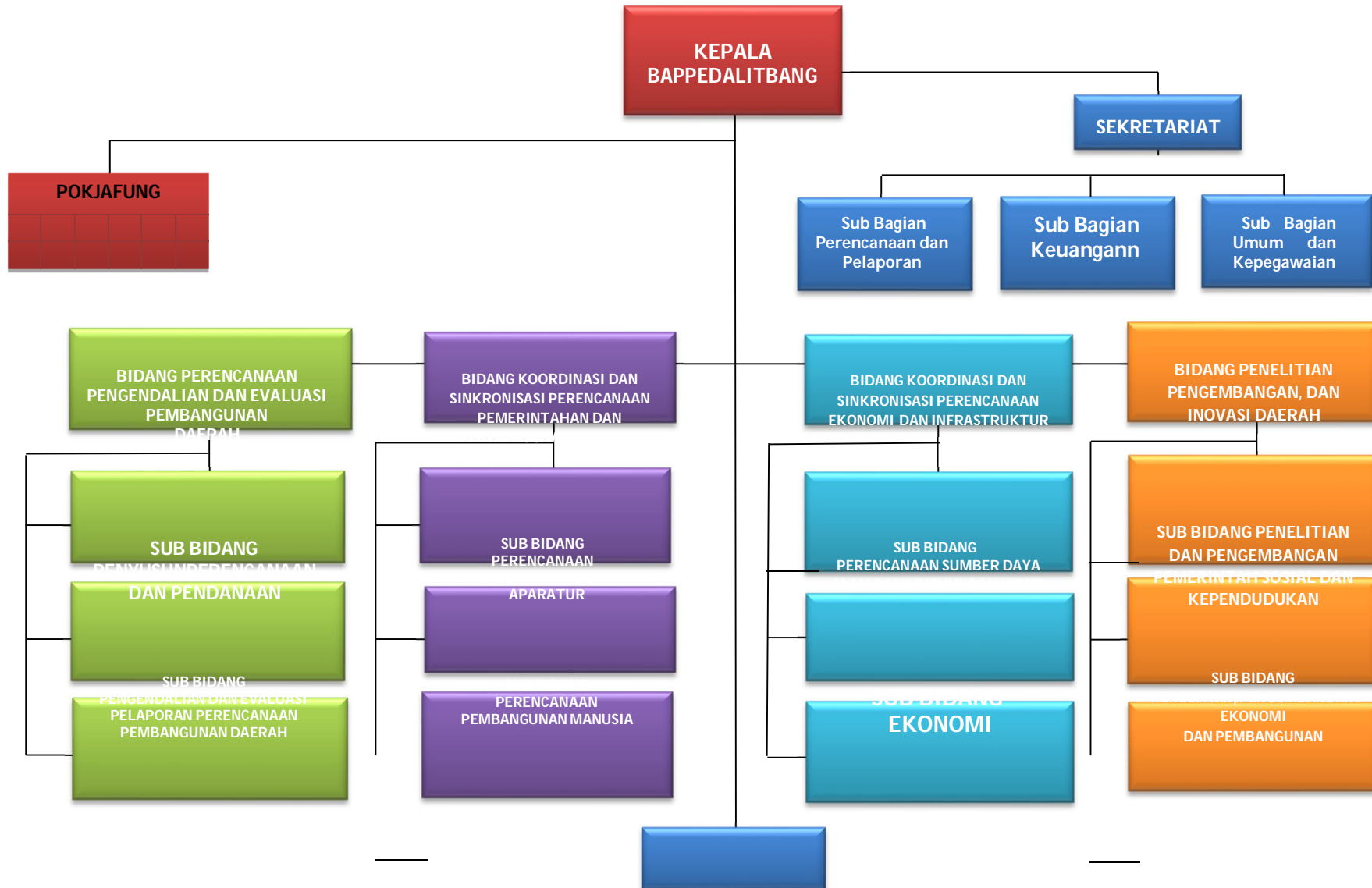


seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDALITBANG KABUPATEN BALANGAN

(Peraturan Bupati Balangan Nomor 21 Tahun 2021)





BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAEDRAH

TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Restra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Bappedalitbang Kabupaten Balangan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Bappedalitbang disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Bappedalitbang Kabupaten Balangan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Bappedalitbang Kabupaten Balangan selama tahun 2023.

Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

a. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. Sementara itu indikator kinerja merupakan indikator yang menjelaskan mengenai kinerja. Hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Kinerja dapat diartikan sebagai hasil/keluaran dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Penetapan indikator kinerja untuk mengukur sasaran bervariasi, tergantung jenis indikator sarannya. Sedangkan indikator yang digunakan

untuk mengukur kegiatan adalah *input*, *output* dan *outcome*. Kriteria pengukuran yang digunakan adalah target kinerja yang ditetapkan setiap tahunnya. Target kinerja tersebut merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Setiap akhir tahun, target kinerja (*performanceplan*) akan dibandingkan dengan realisasinya (*performanceresult*), sehingga diketahui celah kinerja (*performancegap*). Celah kinerja ini kemudian dianalisis untuk diketahui penyebab ketidakberhasilan. Selanjutnya terhadap kekurangan yang terjadi akan ditetapkan untuk peningkatan kinerja dimasa datang (*perfomanceimprovement*).

Pada tahun 2024 Bappedalitbang kabupaten Balangan secara keseluruhan telah menetapkan kelompok indikator kinerja tersebut dengan tingkat capaian *outcome*-nya. Pengukuran kinerja Bappedalitbang kabupaten Balangan terletak pada seberapa jauh capaian masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kemudian dikategorisasikan pencapaian kerjanya ke dalam empat kategori sebagai berikut :

Urutan	Rentang Capaian	Kategori
I	Sama dengan atau lebih dari 91%	Sangat Baik
II	81% s/d 90%	Baik
III	60% s/d 80%	Cukup
IV	Kurang dari 60%	Kurang

Apabila terdapat sasaran yang memiliki lebih dari satu indikator kinerja, maka ditetapkan indikator sasaran rata-rata untuk menyimpulkan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian tiap sasaran.

Implementasi rencana strategik Bapperida kabupaten Balangan dalam tahun 2024 dilaksanakan dalam rangka mewujudkan sasaran strategik, rencana kerja dan penetapan kinerja. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dapat dikatakan memenuhi target yang ditetapkan dalam Renstra SKPD .

Berdasarkan besaran alokasi dana yang dianggarkan untuk Bappedalitbang Kabupaten Balangan tahun anggaran 2023 dalam melaksanakan seluruh program , kegiatan dan subkegiatan serta untuk mencapai sasaran yang diinginkan, mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp.**

28.495.555.555,- yang terdiri atas **belanja tidak langsung** sebesar **Rp. 20.642.187.870,-** dan **belanja langsung** sebesar **Rp. 7.853.367.685,-**

Pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat pada tahun 2023 dan terbagi pada **4 (Empat) program, 16 (Enam Belas) kegiatan dan 59 (Lima Puluh Sembilan) Subkegiatan**. Realisasi Keuangan pada tahun 2023 dari *Belanja tidak langsung* dan *Belanja langsung*, Bappedalitbang adalah **Rp. 19.971.580.789,-** atau **(94,85%)** dengan rincian **Rp. 12.118.223.100,- (90,36 %)** untuk **belanja Langsung** dan **Rp. 7.853.357.686,- (25,83 %)** untuk **belanja tidak langsung**. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada *lampiran 2*. Dari pengukuran kinerja pada seluruh program/kegiatan/subkegiatan pada tahun 2023 didapat realisasi fisik kegiatan sebesar **94,85 %** dengan kategori **Baik**. Guna melaksanakan seluruh program, kegiatan dan subkegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, Anggaran Bappedalitbang kabupaten Balangan tahun 2023 menganggarkan **belanja langsung** sebesar **Rp 7.853.367.686,- (90,36 %)** Data Anggaran dan Realisasi Program dan kegiatan Bappedalitbang untuk tahun anggaran 2024 pada tabel 1 berikut :

Tabel. 1.

Realisasi Keuangan Program Kegiatan dan Subkegiatan Bappedalitbang Balangan Berdasarkan Anggaran Belanja Langsung Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.396.611.355	11.748.725.455	92.66%
	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	384.973.000	384.973.000	100%
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.235.000	26.235.000	100%
	2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	253.558.000	253.558.000	100 %
	3. Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	105.180.000	105.180.000	100%
	b. Administrasi Keuangan	7.853.367.685	7.853.367.685	100%

Perangkat Daerah				
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.620.242.602	7.620.242.602	100%
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	211.825.083	211.825.083	100%
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.200.000	14.200.000	100 %
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	7.100.000	7.100.000	100 %
c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	106.810.000	106.810.000	100%
2.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	540.000.000	540.000.000	100 %
d. Administrasi Umum Perangkat Daerah				
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	38.402.800	38.402.800	100%
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.705.700	196.825.400	98.71 %
3.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	91.579.000	91.579.000	100 %
4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.680.000	16.680.000	100 %
5.	penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	631.289.000	631.289.000	100 %
		866.656.500	974.878.200	97.66 %

	SKPD			
	e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	217.500.000	217.500.000	97.71 %
	1. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangun lainnya	217.500.000	217.500.000	98.49 %
	f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.143.122.100	1.143.122.100	100 %
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	253.770.400	253.770.400	100 %
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	889.351.700	889.351.700	100 %
	g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.175.962.370	853.796.170	92.75 %
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	257.256.100	257.256.100	100 %
	2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	918.706.270	596.540.070	97.97 %
II	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.157.619.000	2.101.705.811	97.41 %
	a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2.869.580.900	2.869.580.900	100%
	1. Koordinasi Penelaahan	219.410.000	219.410.000	100%

	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya			
2.	Pelaksanaan Konsultasi Publik	331.997.000	331.997.000	100%
3.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	568.300.700	568.300.700	100%
4.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabuapten/Kota	1.749.873.200	1.749.873.200	98.81%
b.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	145.630.000	140.731.391	96.64%
1.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	268.188.000	268.188.000	100 %
2.	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	16.840.000	16.840.000	100 %
c.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	432.987.000	432.987.000	100 %
1.	Koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di kabupaten / kota	355.160.000	355.160.000	98.65 %
2.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	77.827.000	77.827.000	100%

III	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.175.405.800	5.023.144.900	94.36 %
------------	---	----------------------	----------------------	----------------

<p>1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</p>	<p>2.634.667.000</p>	<p>2.583.406.100</p>	<p>90.98 %</p>
<p>2. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)</p>	<p>628.066.000</p>	<p>628.066.000</p>	<p>100 %</p>
<p>3. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan</p>	<p>378.161.900</p>	<p>325.901.000</p>	<p>77.64 %</p>
<p>4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan</p>	<p>159.895.000</p>	<p>159.895.000</p>	<p>83.29 %</p>
<p>5. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan</p>	<p>577.632.100</p>	<p>577.632.100</p>	<p>100 %</p>
<p>6. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)</p>	<p>95.461.000</p>	<p>95.461.000</p>	<p>100 %</p>
<p>7. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</p>	<p>41.450.000</p>	<p>41.450.000</p>	<p>100%</p>
<p>8. Pelaksanaan Monitoring</p>			

	dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	61.190.000	61.190.000	100 %
9.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	692.811.000	692.811.000	100 %
10.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	884.450.800	884.450.800	100%
11.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	231.468.000	231.468.000	100 %
12.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	55.552.400	55.552.400	97.08 %
13.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	33.342.400	33.342.400	100%
14.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	118.199.000	118.199.000	100 %
15.	Koordinasi Penyusunan			

	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)	137.042.400	137.042.400	100 %
16.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	244.880.000	244.880.000	100 %
17.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	30.233.400	30.233.400	96.24 %
18.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	33.723.200	33.723.200	99.24 %
19.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.656.288.000	1.556.288.000	98.85 %
20.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)	169.624.000	169.624.000	100%
21.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	18.350.000	18.350.000	100 %
22.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	32.586.000	32.586.000	100%

IV	Infrastruktur			
	23. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	226.465.000	226.465.000	98.85 %
	24. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1.209.253.000	1.109.263.000	99.26%
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	7.335.942.500	7.335.942.500	100%
	a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	632.273.000	632.273.000	100%
	1. Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum	400.120.000	400.120.000	98.87%
	2. Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan	232.153.000	232.153.000	92.69%
	b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1.750.130.000	1.750.130.000	100%
	1. Penelitian dan Badan Usaha Milik Daerah	170.070.000	170.070.000	99.95%
	2. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	180.030.000	180.030.000	99,58%
	3. Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	94.320.000	92.650.294	98,23%
	4. Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	298.520.000	298.080.808	99,85%
	5. Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan	1.400.030.000	1.400.030.000	99,82%

Bab II.Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

	Umum			
	6. Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	94.320.000	93.014.000	98,62%
	7. Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	675.650.000	673.089.779	99,62%
	c. Pengembangan Inovasi dan Teknologi	4.773.659.500	4.773.659.500	100%
	1. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	4.467.636.500	4.467.636.500	100%
	2. Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan di bidang Teknologi dan Inovasi	306.023.000	306.023.000	100%
	Total Anggaran	28.495.555.555	19.971.580.789	94,85 %

Dari berbagai program ,kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan Bappedalitbang pada tahun 2024 dari Belanja tidak langsung dan Belanja langsung, realisasi keuangan Bappedalitbang adalah Rp. **19.971.580.789,-** atau **94,85 %** dengan rincian Rp. **12.118.223.100,- (25,83%)** untuk belanja tidak langsung dan Rp.7.853.357.689,- (90,35 %) untuk belanja langsung

Jika dilihat dari hasil prosentase realisasi fisik program Kegiatan dan subkegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan dari 4 Program, 16 kegiatan dan 59 subkegiatan menunjukkan persentase sebesar **94,85 %**. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada *lampiran tabel T.C 29*.

Berdasar data diatas berikut kesimpulan terhadap realisasi keuangan pada program kegiatan dan subkegiatan berdasarkan target yang direncanakan, diantaranya :

1. Realisasi program/kegiatan/subkegiatan yang tidak memenuhi target kinerja/keluaran yang direncanakan.

- a. Kegiatan yang pencapaian kinerja program/kegiatan rata-rata masih di bawah kategori baik (<80%) yaitu :
 - subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (100 %) pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (94,16 %) pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (99,57 %) pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (90,36 %) pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - subkegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (95,75 %) pada Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja/keluaran yang direncanakan.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah



- Pelaksanaan Penatausahaan dan pengkajian / verifikasi keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan / Triwulan / semester SKPD

b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyedia Komponen Intalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang – undangan
- Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Pengadaan sarana dan Prasarana Pedukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya Air dan listrik
- Penyedia jasa pelayanan Umum Kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyedia Jasa Pemeliharaan ,Biaya pemeliharaan pajak, dan perijinan kendaraan dinas operaasional atau lapangan
- Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung

kantor atau bangunan lainnya

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

- Koordinasi penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya
- Pelaksanaan Konsultasi publik
- Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
- Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

- Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah
- Penyusunan profil pembangunan daerah kabupaten / kota

3. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah

- Koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di kabupaten/ kota
- Monitoring evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah

4. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan

Pembangunan

a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

- Kordinasi penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
- Kordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,RPJMD dan RKPD)
- Asistensi Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang pembangunan Manusia
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- Koordinasi Pelaksanaan Sinegritas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang pembangunan Manusia

b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJMD, RPJPD dan RKPD)
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dukumen

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Perekonomian

- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan perangkat Daerah Bidang SDA
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Perangkat Dearah Bidang SDA
- Koordinasi Pelaksanaan sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan pembangunan Daerah Bidang SDA

c. Koordinasi Perencanaan Bidang infrastruktur dan Kewilayahan

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur(RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Perangkat Dearah Bidang Infrastruktur
- Koordinasi Pelaksanaan sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

B. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

- Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum
- Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan

b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan



Pembangunan

- Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah
- Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
- Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
- Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
- Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
- Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
- Penelitian dan Pengembangan Penanta Ruang dan Pertanahan

c. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

- Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif

1. Realisasi Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Bappedalitbang.

Pada pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun anggaran 2022, realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah tidak ada.

TABEL . 2.Adapun untuk Realisasi Keuangan Program Kegiatan dan subkegiatan Bappedalitbang Balangan Berdasarkan Anggaran Belanja Langsung Tahun 2024 sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.759.208.566	9.968.991.534	84,85 %
	a. Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	163.023.600	106.703.600	65,45 %

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.979.350	32.179.350	78,53 %
2.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	59.089.700	27.409.700	46,16 %
3.	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	62.954.550	47.114.500	74,84 %
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.972.902.325	4.698.214.759	78,66 %
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.893.062.715	4.621.676.749	78,43 %
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60.744.860	59.959.160	98,71 %
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.400.100	7.639.400	90,95 %
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	10.694.650	8.939.450	83,59 %

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.018.909.850	993.944.950	97,55 %
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	42.750.000	42.750.000	100 %
2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	976.159.850	951.194.950	97.44 %
d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.025.157.250	958.068.492	93,46%
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.667.700	23.571.000	99,60%
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	332.849.800	305.590.000	91,81 %
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	109.999.750	102.136.600	92,85%
5. penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.640.000	8.640.000	100 %
e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	550.000.000	518.130.892	94.21 %
1. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau barang lainnya	217.358.000	210.118.000	96,67 %
f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	574.113.000	515.076.033	89,72 %
1. Penyediaan Jasa komonikasi,sumber daya air dan listrik	196.000.000	188.330.033	96,09%
2. Penyedia jasa pelayanan umum kantor	378.113.000	326.746.000	86,41 %
g..Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.094.438.000	1.058.677.607	96,73%

		195.998.000	195.784.107	99,89 %
	1. Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	898.440.000	862.893.500	96.04 %
II	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.617.333.200	1.517.009.964	93,80%
	a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.107.567.550	1.065.198.820	96,17%
	1. Koordinasi Penelaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	153.683.850	146.865.000	95,56%
	2. Pelaksanaan Konsultasi Publik	13.800.000	13.720.000	99,42 %
	3. Pelaksanaan Musrembang Kabupaten/ Kota	125.419.800	121.258.000	96,68%
	4. Koordinasi penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	814.663.900	783.355.820	96,16 %
	b. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	391.722.850	337.008.644	86,03 %
	1. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	185.436.850	132.761.644	71,60%
	2. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	206.286.000	204.247.000	99,01%
	c. Pengendalian Evaluasi			

	dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	118.042.800	114.802.500	97,95%
	1. Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala pelaksanaan Pembangunan Daerah	118.042.800	114.802.500	97,95%
III	Program Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan Pembangunan Daerah	2.410.047.950	427.025.174	90,22%
	1.Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Perangkat Dearah Bidang Pembangunan Manusia	37.368.000	32.510.700	90,57%
	2.Koordinasi pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi perencanaan Pembangaunan Deaerah Bidang	108.321.000	106.519.526	98,34%
	D.Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	694.028.900	684.535.894	98,63%
	1.Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (PJPd,RPJMD, dan RKPD)	120.920.000	120.598 850	99,73%
	2.Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	39.418.500	38.602.530	97,93%
	3.Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	18.260.000	18.170.000	99,51%
	4.Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	127.862.750	127.791.807	99,94%

5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)	99.066.000	95.040.559	95,94%
6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Dearah Bidang SDA	137.1986.800	135.124.050	98,49%
7. Pelaksanan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	39.243.000	37.901.200	96,58%
8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	112.059.850	112.306.898	99,33%
E. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	576.789.050	553.722.922	96,%
1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	130.366.800	127.602.050	97,88%
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	24.295.950	22.938.900	94,41%
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dokumen Perencananaan Pembangunan perangkatat Daerah Bidang Infrastruktur	104.204.950	98.336.500	94,37%
4.Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	317.921.350	304.845.472	95,89%

IV. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.348.278.700	1.322.807.120	98,11%
a. Penelitian dan Pengembangan Bidang penyelenggaraan pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	573.945.700	563.273.465	98,14%
1. Fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum	450.060.000	449.229.399	99,82 %
2. Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan	121.885.700	114.044.066	92,06%
b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	524.333.000	513.991.000	98,02%
1. Penelitian dan pengembangan pekerjaan umum	524.333.000	513.991.000	98,02%
c. Pengengembangan Inovasi dan Teknologi	250.000.000	245.542.655	98,22%
1. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	250.000.000	245.542.655	98,22%
Total Anggaran	21.056.536.066	19.971.580.789	88,69 %

Dari berbagai program ,kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan Bappedalitbang pada tahun 2024 dari Belanja tidak langsung dan Belanja langsung, realisasi keumagan Bappedalitbang adalah Rp. 19.971.580.789,- atau 88,69% dengan rincian Rp. 12.118.223.100,- (95,03%) untuk belanja tidak langsung dan Rp 7.853.367.685,-(78,43%) untuk belanja langsung

Jika dilihat dari hasil persentase realisasi fisik program Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Badan Perencanaan pembangunan Daerah penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan dari 4 Program, 17 kegiatan dan 52 subkegiatan menunjukkan yang dipersentase sebesar 77,73 % untuk jelas dapat dilihat pada lampiran table T.C 29.

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Bapperida kabupaten balangan

Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Restra Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Target Kineja Hasil program dan Keluaran KEGIATAN S/D Dengan Tahun (n-3)2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu(n-2)						Target Pogram dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Tingkat Capaian Realisasi Target Restra (%)	
			4	Rp	5	Rp	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	11		
			Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun(n-2) 2022		Tingkat Realisasi (%)					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun berjalan (n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1	2	3	4	Rp	5	Rp	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	11	12	
	Usuran																	
	Bidang Usuran																	
01	Program : Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja	100	83.317.314.576	100	3.488.732.036	63	9.956.815.058	63	12.837.678.502	100	129	70,95	9.968.991.534	100	11,97	Bag. Umum /Bag. Perencanaan	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentasi ketersediaan dokumen perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat Daerah	100	1.069.756.228	100	46.995.000	100	163.023.600	100	106.703.400	100	65	100	151.222.400	100	14,14		
01	02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	18	326.586.387	3	3.875.000	2	40.979.350	2	32.179.350	100,0	78,53	2	16.728.000	11,1	5,1	
01	07	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA dan SKPD	24	371.369.680	4	26.875.000	4	59.089.700	4	27.409.700	100,0	46,39	4	41.947.200	16,7	11,3	
01	08	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	18	371.800.161	3	16.245.000	4	62.954.550	4	47.114.350	100,0	74,84	4	92.547.200	22,2	24,9	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Restra Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Target Kineja Hasil program dan Keluaran KEGIATAN S/D Dengan Tahun (n-3)2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu(n-2)						Target Pogram dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Tingkat Capaian Realisasi Target Restra (%)
			4	Rp	5	Rp	6	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022		8	Tingkat Realisasi (%)	9	Rp	10	11		
								7	Rp								
1	2	3	4	Rp	5	Rp	6	Rp	7	Rp	8		9	Rp	10	11	12
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun dengan baik	100	36.993.982.774	100	1.231.810.682	100	5.972.842.325	100	4.698.168.755	100,0	78,66	100	5.929.979.437	100,0	16,0	
01 09	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN orang / bulan	72	36.461.613.124	12	1.181.858.958	100	5.893.002.715	100	4.621.676.745	100,0	78,43	33	5.538.280.650	45,8	15,2	
01 10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan pengujian verifikasi keuangan SKPD	72	415.374.055	12	17.487.964	12	60.744.860	12	59.913.160	100,0	98,63	12	58.336.071	16,7	14,0	
01 11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil kordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	12	58.484.061	2	7.650.000	2	8.400.100	2	7.639.400	100,0	90,94	1	5.609.500	8,3	9,6	
01 12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/semester/ SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/triwulan / semesteran SKPD	12	58.511.534	2	24.813.760	2	10.694.650	2	8.939.450	-	-	1	20.000.000	8,3	34,2	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi,sarana & prasarana perkantoran	100	1.112.409.180	100	257.513.637	100	976.159.850	100	951.194.950	100,0	97,44	100	1.208.708.587	100,0	108,7	
01 13	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	330	259.936.200	-	158.013.637	60	18.000.000	115	42.750.000	-	-	33	122.680.000	10,0	47,2	
01 15	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan peraturan perundang undangan	72	852.472.980	12	99.500.000	12	976.159.850	12	951.194.950	100,0	97,44	12	21.543.800	16,7	2,5	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi,sarana & prasarana perkantoran	100	4.044.710.042	100	308.277.598	100	1.025.157.250	100	958.134.292	100,0	93,46	100	1.266.411.890	100,0	31,3	

Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Restra Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Target Kineja Hasil program dan Keluaran KEGIATAN S/D Dengan Tahun (n-3)2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu(n-2)						Target Pogram dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Tingkat Capaian Realisasi Target Restra (%)	
			4	Rp	5	Rp	6	Rp	7	Rp	8	Tingkat Realisasi (%)	9	Rp	10	11		
																		Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022
1	2	3	4	Rp	5	Rp	6	Rp	7	Rp	8		9	Rp	10	11	12	
01	17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen intalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	72	162.617.175	12	26.686.000	12	23.667.700	12	23.571.000	100,0	99,59	4	552.856.600	5,6	340,0	
01	18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	24	1.420.986.765	4	82.429.800	12	332.849.800	12	305.390.000	100,0	91,75	12	102.482.400	50,0	7,2	
01	20	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	72	406.460.458	12	45.695.000	12	109.999.750	12	102.402.400	100,0	93,09	12	3.206.400	16,7	0,8	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	72	62.348.064	12	4.800.000	12	8.640.000	12	8.640.000	100,0	100,00	12	13.440.000	16,7	21,6	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	72	1.992.297.580	12	148.666.798	12	550.000.000	12	518.130.892	100,0	94,21	12	697.841.964	16,7	35,0	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat yang baik	5	843.054.000	1	204.870.000	2	210.118.000	2	210.118.000	100,0	100,00	3	414.988.000	60,0	49,2	
		Pengadaan kendaraan dinas oprasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas oprasional atau lapangan yang disediakan	-		3	70.600.000	-		-				18	452.050.000			

Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Restra Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Target Kineja Hasil program dan Keluaran KEGIATAN S/D Dengan Tahun (n-3)2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu(n-2)						Target Pogram dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Tingkat Capaian Realisasi Target Restra (%)
			4	Rp	5	Rp	6	Rp	7	Rp	8	Tingkat Realisasi (%)	9	Rp	10	11	
1	2	3	4	Rp	5	Rp	6	Rp	7	Rp	8		9	Rp	10	11	12
		Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	-		-		-		-			1	541.700.060	-		
02	14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jmlah unit sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	2	843.054.000	1	204.870.000	1	210.118.000	1	210.118.000	100,0	100,00	2	414.988.000	100	49,2
		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan administrasi,sarana & prasarana perkantoran	100	3.923.733.608	100	210.984.405	100	515.076.033	100	859.026.300	100,0	166,78	200	1.070.010.705	200	27,3
02	22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	72	1.356.099.600	12	55.260.805	12	188.330.033	12	209.488.100	100,0	111,23	12	209.448.106	16,7	15,4
02	24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	72	2.567.634.008	12	155.723.600	12	326.746.000	12	649.538.200	100,0	198,79	12	649.538.200	16,7	25,3
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik daerah BappedaLitbang	100	2.215.567.123	100	178.563.200	100	1.094.438.000	100	1.058.677.607	100,0	96,73	100	1.237.240.807	100,0	55,8
02	28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dina oprasional atau lapangan yang di pelihara dan di bayarkan pajak dan perijinannya	22	1.124.435.079	22	108.397.600	22	195.998.000	22	195.784.107	100,0	99,89	43	215.310.549	195,5	19,1
03	02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasaranan gedung kantor atau bangunan lainnya di pelihara atau di rahabilitasi	72	1.091.132.044	12	70.165.600	100	898.440.000	100	862.893.500	100	96,04	2	615.366.000	2,8	56,4

Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Restra Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Target Kineja Hasil program dan Keluaran KEGIATAN S/D Dengan Tahun (n-3)2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu(n-2)						Target Pogram dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Tingkat Capaian Realisasi Target Restra (%)	
			4	Rp	5	Rp	6	Rp	7	Rp	Tingkat Realisasi (%)		9	Rp	10	11		
											Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun(n-2) 2022						8
1	2	3	4	Rp	5	Rp	6	Rp	7	Rp	8		9	Rp	10	11	12	
15	Program : Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Usulan Masyarakat (Musrebang), Usulan DPRD (POKIR), Serta Keselarasan Dokumen pPerencanaan Pembangunan Daerah (Nasional ,Provinsi Kabupaten)	99,4	21.975.660.905	98,2	2.327.091.348	98,2%	1.324.429.550	100%	1.235.166.964	100	93,26	100	3.562.258.312	100,6	16,2	Bidang Makro	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah hasil penyusunan perencanaan dan penganggaran dengan nilai baik	94,4	17.871.032.679	100	2.172.543.443	84%	814.663.900	100%	783.355.820	100	96,16	100	2.955.899.263	105,9	16,5		
15	10	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah telaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah	24	940.295.143	-	-	4	153.682.850	4	146.865.000	-	-	3	119.104.220	12,5	12,7	
15	11	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah berita acara konsultasi publik	9	258.794.730	-	46.899.000	1	13.800.000	1	13.720.000	-	-	2	104.458.000	22,2	40,4	
20		Pelaksanaan Musrebang Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara musrebang kabupaten/ kota	9	1.871.244.363	0	881.586.043	1	125.419.800	1	121.238.000	-	-	1	177.837.000	11,1	9,5	Bidang Makro
20	02	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kab.kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	14	14.800.698.443	7	1.244.058.400	2	814.663.900	2	783.355.820	100,0	96,16	2	1.288.784.200	14,3	8,7	
20	03	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tingkat keterisian data perencanaan	80%	3.708.513.226	80%	70.373.600	60%	391.722.850	100%	337.008.644	166,7	86,03	2	407.382.244	225,0	11,0	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Restra Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Target Kineja Hasil program dan Keluaran KEGIATAN S/D Dengan Tahun (n-3)2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu(n-2)						Target Pogram dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Tingkat Capaian Realisasi Target Restra (%)	
			4	Rp	5	Rp	6	Rp	7	Rp	8	Tingkat Realisasi (%)	9	Rp	10	11		
			Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun(n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Pogram dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun berjalan (n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)										
1	2	3	4	Rp	5	Rp	6	Rp	7	Rp	8	9	Rp	10	11	12		
21	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah (semua perencanaan pembangunan daerah)	2	916.398.044	1	6.600.000	2	185.436.850	2	132.761.644	100,0	71,59	1	83.984.000	50,0	9,2	
21	05	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah buku profil pembangunan daerah yang diterbitkan	2	2.792.115.182		63.773.600	2	206.286.000	2	204.247.000	100,0	99,01	1	56.747.391	50,0	2,0	
21	08	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi Pengendalian dan Evaluasi yang ditindak lanjuti	100%	396.115.000	100	154.547.905	100%	118.042.800	100%	114.802.500	100,0	97,25	101	269.350.405	10.100,0	68,0	
21	09	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	58	396.115.000	2	154.547.905	10	118.042.800	12	114.802.500	120,0	97,25	10	53.931.900	17,2	13,6	
23		Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian sasaran kinerja RPJMD	96,8%	9.546.748.297	96	368.723.774	92,6%	2.092.124.600	100%	2.010.270.247	108	96,09	124	2.378.994.021	12.809,9	24,9	Bidang Pemosbud
			Persentasi Capaian sasaran kinerja RPJMD	96,8%		96		92,6%		100%								
23		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah perangkat daerah dengan nilai kualitas perencanaan yang baik	299	4.492.660.697	60	186.806.874	100	1.139.228.000	100	1.076.957.102	100	94,53	3	250.348.300	1,0	5,6	
23		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan yang di koordinir penyusunan(RPJPD/RPJMD/R	13	1.973.764.358	2	23.979.054	2	484.126.000	2	456.248.797	100	94,24	2	490.528.686	15,4	24,9	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Restra Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Target Kineja Hasil program dan Keluaran KEGIATAN S/D Dengan Tahun (n-3)2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu(n-2)						Target Pogram dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Tingkat Capaian Realisasi Target Restra (%)
			4	Rp	5	Rp	6	Rp	7	Rp	8	Tingkat Realisasi (%)	9	Rp	10	11	
1	2	3	4	Rp	5	Rp	6	Rp	7	Rp	8		9	Rp	10	11	12
23		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan	192	836.671.931	32	13.645.000	38	223.460.000	38	216.989.620	100	97,10	38	169.287.300	19,8	20,2
23	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyusun dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang poemerintahan	384	749.250.596	64	31.002.820	76	115.703.000	76	103.812.461	100	89,72	76	81.155.934	19,8	10,8
23		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan laporan hasil sinkronisasi resnstra/ renja dengan RKPD/RPJMD dan RKPD pada bidang pemerintahan	100		0		100	78.400.000	38	75.228.892	38	95,96	38	553.578.798	38,0	
23	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan manusia yang dikordinir penyusunannya (RPJPD,RPJMD,RKPD)	13	316.716.409	4	93.727.000	2	44.590.000	2	42.845.300	100	96,09	2	47.916.800	15,4	15,1
23	17	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembagunan manusia	48	332.817.026	14	2.214.000	2	47.260.000	8	42.801.806	57	90,57	6	45.626.200	12,5	13,7
23	18	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	96	283.440.377	28	22.239.000	16	37.368.000	16	32.510.700	100,0	87,00	12	55.113.144	12,5	19,4

Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Restra Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Target Kineja Hasil program dan Keluaran KEGIATAN S/D Dengan Tahun (n-3)2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu(n-2)						Target Pogram dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Tingkat Capaian Realisasi Target Restra (%)
			4	Rp	5	Rp	6	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022		8	Tingkat Realisasi (%)	9	Rp	10	11		
								7	Rp								
1	2	3	4	Rp	5	Rp	6	Rp	7	Rp	8		9	Rp	10	11	12
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	100		-		100	108.321.000	100	106.519.526		98,34	6	145.041.081	6,0		
23	19	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	52	3.084.236.357	12	141.491.300	12	694.028.900	12	684.435.692	100,0	98,62	24	825.926.992	46,2	26,8	
23	20	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)		666.609.196	3	53.090.000	2	120.920.000	2	120.598.850	100,0	99,73	2	121.011.259	#DIV/0!	18,2	
26	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	26	211.603.000	6	6.090.000	4	39.418.500	4	38.602.530	100,0	97,93	6	38.746.800	23,1	18,3	
26	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	24	101.706.300	4	6.990.000	4	18.260.000	4	18.170.600	100,0	99,51	12	23.232.400	50,0	22,8	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	100		-	12.332.000	5	127.862.750	5	127.791.807	100,0	99,94	6	104.945.194			
26	04	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)	13	829.993.947	3	42.766.400	2	99.066.000	2	95.040.559	100,0	95,94	2	150.960.725	15,4	18,2	

Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Restra Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Target Kineja Hasil program dan Keluaran KEGIATAN S/D Dengan Tahun (n-3)2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu(n-2)						Target Pogram dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Tingkat Capaian Realisasi Target Restra (%)
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun(n-2) 2022		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun berjalan (n-1) 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Restra (%)		
								Rp									
1	2	3	4	Rp	5	Rp	6	Rp	7	Rp	8		9	Rp	10	11	12
26	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	26	1.002.361.475	6	12.332.000	4	137.198.800	4	135.124.050	100,0	98,49	4	44.085.500	15,4	4,4	
26	10	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	24	271.962.439	4	7.890.900	4	39.243.000	4	37.901.200	100,0	96,58	8	31.156.800	33,3	11,5	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Restra Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Target Kineja Hasil program dan Keluaran KEGIATAN S/D Dengan Tahun (n-3)2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu(n-2)						Target Pogram dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Tingkat Capaian Realisasi Target Restra (%)
			4	Rp	5	Rp	6	Rp	7	Rp	8	Tingkat Realisasi (%)	9	Rp	10	11	
1	2	3	4	Rp	5	Rp	6	Rp	7	Rp	8		9	Rp	10	11	12
26		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah BidangSDA	Jumlah laporan hasil singronisasi rensra / renja dengan RKPD/ RPJMD padaa bidang SDA	100		0		5	112.059.850	5	111.206.096	100,0	99,24	4	117.508.494	4,0	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah perangkat daerah dengan nilai kualitas perencanaan yang baik	50	1.969.851.243	2	40.425.600	6	258.867.700	9	248.877.453	150	96,14	11	289.303.053	22,0	14,7
26	11	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infastruktur yang di koordinir penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	13	830.355.695	3	40.425.600	2	130.366.800	2	127.602.053	100,0	97,88	2	163.996.700	15,4	19,8
26	12	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infastruktur	13	165.204.240	9	20.260.000	6	24.295.950	6	22.938.900	100,0	94,41	6	6.026.000	46,2	3,6
26	13	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil peralaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infastruktur	24	974.291.308	4	30.370.000	4	104.204.950	4	98.336.500	100,0	94,37	12	30.258.000	50,0	3,1
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil singronisasi renstra, renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Infrastruktur	100		-		5	317.921.350	5	304.845.472	100,0	95,89	4	29.608.625	4,0	

Kode Rekening	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Restra Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Target Kineja Hasil program dan Keluaran KEGIATAN S/D Dengan Tahun (n-3)2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu(n-2)						Target Pogram dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Tingkat Capaian Realisasi Target Restra (%)
				Rp		Rp	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun(n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun berjalan (n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	Rp	5	Rp	6	Rp	7	Rp	8		9	Rp	10	11	12
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kajian kelitbangan yang ditindak lanjuti	100%	#REF!	1	-	55	1.348.278.700	50%	1.322.798.060	0,9	981,10	2	1.322.798.060	150	#REF!	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah ringkasan penelitian dan pengembangan tahunan /policy paper	13	2.871.988.600	3	-	1	573.945.700	3	563.264.405	100,0	98,14	6	563.264.405	46,2	19,6	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Target Kineja Hasil program dan Keluaran KEGIATAN S/D Dengan Tahun (n-3)2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu(n-2)						Target Pogram dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Rp		Rp	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun(n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun berjalan (n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	Rp	5	Rp	6	Rp	7	Rp	8		9	Rp	10	11	12
	Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum	Jumlah laporan hasil pelaksanaan fasilitasi , pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pembangunan bidang pemerintahan umum	6	1.370.020.000	1	141.785.000	5	450.060.000	5	449.220.339	100,0	99,81	2	447.615.295	33,3	32,7	
	Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan	Jumlah data kelitbangan dan peraturan yang dikelola dengan baik	6	1.501.968.600	1	27.278.500	1	123.885.700	1	114.044.066	100,0	92,06	1	177.134.181	16,7	11,8	
	Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	Jumlah penelitian dan pengembangan daerah bidang pemerintahan,sosial dan kependudukan yang dimanfaatkan SKPD			1	192.922.934	1	192.922.934									
	Penelitian dan pengembangan pariwisata	Jumlah penelitian dan pengembangan pariwisata			1	192.922.934				-					4,0		
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah ringkasan penelitian dan pengembangan tahunan /policy paper	12	1.927.076.000	6	-	3	524.333.000	6	513.991.000	100,0	98,03	12	513.991.000	100,0	26,7	
	Penelitian dan pengembangan pertanian perkebunan dan pangan	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan pertanian,perkebunan, pangan								-			1	367.783.108			

Kode Rekening	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Restra Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Target Kineja Hasil program dan Keluaran KEGIATAN S/D Dengan Tahun (n-3)2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu(n-2)						Target Pogram dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Tingkat Capaian Realisasi Target Restra (%)
				Rp		Rp	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun(n-2) 2022		Tingkat Realisasi (%)		Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun berjalan (n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Restra (%)		
1	2	3	4	Rp	5	Rp	6	Rp	7	Rp	8		9	Rp	10	11	12
	Penelitian dan pengembangan lingkungan hidup	Jumlah hasil dokumen penelitian dan pengembangan lingkungan hidup							-	-			2	298.080.808			
	Penelitian dan pengembangan perhubungan	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan perhubungan							-	-			1	93.014.000			
	Penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan			1	116.526.000			-	-			1	92.650.294			
	Penelitian dan pengembangan penataan ruang dan pertanahan	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan penata ruang dan pertanahan			1	517.014.000			-	-			1	673.089.775			
	Penelitian dan pengembangan badan usaha milik daerah	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan badan usaha milik daerah			2	405.420.000			-	-			2	386.639.216			
	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah dokumen hasil peneliti dan pengembangan pekerjaan umum	7	1.927.076.000	2	306.355.566	4	524.333.000	4	513.991.000	100,0	98,03	3	115.573.885	42,9	6,0	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Restra Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Target Kineja Hasil program dan Keluaran KEGIATAN S/D Dengan Tahun (n-3)2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu(n-2)					Target Pogram dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Tingkat Capaian Realisasi Target Restra (%)
				Rp		Rp	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun(n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun berjalan (n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Restra (%)			
1	2	3	4	Rp	5	Rp	6	Rp	7	Rp	8	9	Rp	10	11	12
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi dan teknologi yg dijarah	6	1.465.750.000	1	-	1	250.000.000	1	245.542.655	100,0	98,22	2	245.542.655	33,3	16,8
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah laporan hasil pelaksanaan desemensasi jenis prosuder dan sesuai metode penyelenggaran pemerintahan daerah yang besifat inopatif	6	1.465.750.000	1	50.830.200	1	250.000.000	1	245.542.655	100,0	98,22	1	1.058.587.018	16,7	72,2

Paringin, 2024
Kepala Bapperida
Kabupaten Balangan

H. Rakhmadi Yusni,S.Sos,M.AP
NIP. 197012071995031002

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pelayanan Bapperida adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan di Kabupaten Balangan yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Bappedalitbang Kabupaten Balangan.

Dalam Melakukan Analisis terhadap kinerja pelayanan Bapperida Kabupaten Balangan mengacu pada Indikator – indikator yang tercantum pada Renstra Bappeda Kabupaten Balangan Tahun 2021- 2016. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2023, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bapperida sebagai berikut:

- a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan;
- b. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah;
- c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan;
- d. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan;
- e. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Sedangkan Faktor-faktor penyebab terpenuhi target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD.

Dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Bapperida kabupaten Balangan sehingga implikasi yang timbul adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis Bapperida kabupaten Balangan.

Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil

Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada pengembangan pelayanan yang berbasis perencanaan secara umum.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Strategi Optimalisasi perencanaan daerah yang mampu menjawab tantangan dan peluang dinamika pembangunan daerah dilaksanakan dengan arah kebijakan meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas dalam tahapan, tata cara dan penyusunan perencanaan daerah.
2. Strategi Mengoptimalkan kualitas dan kuantitas SDM Perencana serta sarana dan prasarana organisasi dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Meningkatkan kualitas dan kapabilitas SDM Perencana melalui diklat, bimtek.

- b. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana organisasi sesuai kebutuhan .

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada lampiran tabel T-C 30.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan Uraian Mengenai :

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapperida Kabupaten Balangan tidak lepas dari isu – isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Bapperida, maupun isu – isu yang bersifat eksternal

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Bapperida Kabupaten Balangan sebagaimana diuraikan diatas, dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut :

1. Secara umum kinerja pelayanan Bapperida Kabupaten Balangan terhadap target yang tercantum dalam dokumen perencanaan, baik Renja Tahun 2023 maupun Renja Tahun 2021-2026 sudah cukup baik. Sebagian besar target yang telah ditetapkan dapat tercapai, diantaranya adalah indikator ” persentase hasil kajian penelitian yang di manfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah ” cakupan pelayanan administrasi perkantoran” serta cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur.”
2. Beberapa indikator kinerja daerah bersifat makro yang belum dapat mencapai target, diantaranya laju pertumbuhan ekonomi, kontribusi katagori – katagori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB: Pengeluaran per Kapita disesuaikan, PDRB Perkapita berlaku ; Angka kemiskinan, Persentase Penduduk Miskin (menurut indikator Pemerintahan Kabupaten Balangan); Tingkat Partisipasi Masyarakat; Indeks Pembanguna (IPG); Indeks Reformasi Birokrasi ; Hasil Evaluasi.

SAKIP/Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Pesentase Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban; Tingkat Penggangguran Terbuka; Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja; Jumlah Titik / Persentase Lingkungan Pemukiman Sehat; Penduduk yang Berusia > 15 Tahun Melek Huruf (tidak buta aksara);

Bapperida perlu melakukan koordinasi yang lebih intensif dalam meningkatkan capaian tersebut, dimana hal ini berkaitan dengan

peran Bapperida sebagai Koordinator perencanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan diantaranya;

1. Secara umum anggaran disusun

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan yang terbaru Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011 Nomor 18) maka

1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Bapperida Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut :

a) Tugas Pokok

Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, adalah membantu bupati dalam melaksanakan perencanaan pembangunan , Riset dan Inovasi Daerah.

b) Fungsi

Dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya, Bapperida mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan perencanaan pembangunan riset dan inovasi daerah

5. Pelaksanaan administrasi badan;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

c) Struktur Organisasi

Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bapperida kabupaten Balangan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Adminitrasi Umum Perangkat Daerah
- 3. Program Perencanaan pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**
 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- 4. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Terdiri dari**
 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - Koordinasi Perencanaan Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
 - Koordinasi Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
- 5. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**
 - Penelitian dan Pengebangan Bidang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
- 6. Pengembangan Inovasi dan Teknologi**

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara rinci Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Bapperida Kabupaten Balangan dapat dilihat pada *lampiran 4*.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah, dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.

Kerangka berfikir dalam pengelompokan elemen besar organisasi perangkat daerah adalah bahwa organisasi terdiri atas 5 (lima) elemen yaitu :

1. *Strategic Apex* (Kepala Daerah);
2. *Middle Line* (Sekretaris Daerah);
3. *Operating Core* (Dinas Daerah);
4. *Techno Structure* (Badan/Fungsi Penunjang); dan
5. *Supporting Staff* (Staf Pendukung).

Dinas daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*), yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, yang terdiri atas 6 urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan 8 urusan pilihan.

Badan daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah, dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.

Kerangka berfikir dalam pengelompokan elemen besar organisasi perangkat daerah adalah bahwa organisasi terdiri atas 5 (lima) elemen yaitu :

6. *Strategic Apex* (Kepala Daerah);
7. *Middle Line* (Sekretaris Daerah);
8. *Operating Core* (Dinas Daerah);
9. *Techno Structure* (Badan/Fungsi Penunjang); dan
10. *Supporting Staff* (Staf Pendukung).

Dinas daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*), yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, yang terdiri atas 6 urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan 8 urusan pilihan.

Badan daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Bapperida sebagai Fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 yang berbunyi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut dengan Bapperida atau sebutan lain adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, maka semua kebijakan, program dan kegiatan prioritas daerah menjadi tugas dan fungsi Bapperida sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsimengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*)

1. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi SKPD.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai institusi perencana di tingkat Kabupaten, Bapperida Kabupaten Balangan menghadapi permasalahan dan hambatan pelayanan SKPD sebagai berikut :

1. Masih sedikitnya SDM di bidang perencanaan yang kreatif dan inovatif dan tidak sebanding dengan beban pekerjaan yang semakin meningkat.
2. Belum optimalnya implementasi penyusunan dokumen perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan jadwal dan prosedur yang telah ditetapkan
3. Penetapan indikator kinerja yang masih belum terukur dan tepat sasaran
4. Usulan program kegiatan pembangunan SKPD belum sepenuhnya mengacu kepada tema dan prioritas pembangunan daerah.
5. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan perencanaan daerah.

2. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai institusi perencana di tingkat Kabupaten, Bapperida Kabupaten Balangan menghadapi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD sebagai berikut :

1. Menjadikan dokumen perencanaan sebagai dasar dan pedoman dalam seluruh kegiatan pembangunan yang dilaksanakan

2. Tersusunnya dokumen perencanaan yang sinkron dan runtut sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pembangunan
3. Mampu mengkoordinasikan dan menyelaraskan kegiatan pembangunan agar tidak terjadi duplikasi
4. Penyediaan dan update data sebagai dasar perencanaan dan pembangunan di Kabupaten Balangan
5. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia yang cakap di bidang perencanaan pembangunan daerah

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) 2025 Merupakan Proses Penjabaran dari Sasaran dan Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Tahun 2025 yang disusun memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capainya yang meupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Bapperida Kab. Balangan.

Terkait penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Bapperida Kabupaten Balangan Tahun 2025 dilakukan review terhadap Rancangan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Bapperida Kabupaten Balangan

Berdasarkan proyeksi kinerja makro daerah pada tahun perencanaan 2024 Bappedalitbang sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, telah menyusun Rencana Kerja Bapperida T.A. 2024 yang berisi 4 (*empat*) program dan 16 (*Enam Belas*) kegiatan dengan jumlah pagu indikatif Rp. 19.971.580.789,- (*Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah*). Hasil dari proses penyusunan Renja ini diajukan untuk ditetapkan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2025. Adapun review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Balangan disajikan pada *lampiran tabel T-C .31*



REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN ANGGARAN 2024 KAB. BALANGAN
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025
BAPPERIDA KAB BALANGAN

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Idikatif (Rp.)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu
	(2)	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	
					Rp 20.822.804.979,00			Rp -	Rp 20.822.804.979,00			24.806.537.609,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	69	Rf 10.135.953.179,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 10.135.953.179,00	APBD		69	11.787.307.721
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat	Kabupaten Balangan	100%	Rf 213.850.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 213.850.000,00	APBD		100%	245.927,500
	Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja murni dan Renja Perubahan Bappedalitbang (dokumen)	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	2 Dokumen	Rf 20.750.000,00	Rp -		Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Rp 20.750.000,00	APBD		5 Dokumen	20.750.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan DPA Bappedalitbang (dokumen)	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	4 Dokumen	Rf 55.820.000,00	Rp -	Rp -	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Rp 55.820.000,00	APBD		8 dokumen	217.050.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD	Jumlah dokumenTersusunnya LKIP, LPPD, LKPJ Laporan e-Monev KURKIN Bappedalitbang	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	4 Dokumen	Rf 137.280.000,00	Rp -	Rp -	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kineja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pe	Rp 137.280.000,00	APBD		4 Laporan	105.180.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentasi dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun dengan baik	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	100%	Rf 5.757.333.015,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.757.333.015,00	APBD		100%	6.703.027,139
	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	33 orang	Rf 5.904.446.979,00	Rp -	Rp -	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 5.904.446.979,00	APBD		33 orang	7.620.242.336,00
sun an Lap ora n Cap ala	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/VerifikasiKeuangan SKPD	Cakupan Pemenuhan jasa administrasi keuangan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	12 Dokumen	Rf 56.787.000,00	Rp -	Rp -	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 56.787.000,00	APBD		2 dokumen	211.825.083,00
	Koordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan AkhirTahun SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan semesteran	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 Laporan	Rf 8.809.000,00	Rp -	Rp -	Jumlah Laporan Keuanga Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun skpd	Rp 8.809.000,00	APBD		1 laporan	14.200.000,00

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Idikatif (Rp.)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 Laporan	Rp 7.100.000,00	Rp -	Rp -	Jumlah Laporan Keuangan Bulan / Triwulan / Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Rp 7.100.000,00	APBD		1 laporan	7.100.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi, sarana & prasarana	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	100%	Rp 337.500.000,00	Rp -	Rp -		Rp 337.500.000,00	APBD		100%	388.125.000
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 paket	Rp 97.100.000,00	Rp -	Rp -	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Rp 97.100.000,00	APBD		200 paket	106.810.000,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	12 bulan	Rp 240.400.000,00	Rp -	Rp -	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Rp 240.400.000,00	APBD		50 Orang	240.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi, sarana & prasarana perkantoran	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	100%	Rp 570.834.300,00				Rp 570.834.300,00	APBD		100%	825.653.690
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan kantor	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	12 paket	Rp 17.722.900,00	Rp -	Rp -	Jumlah Pakakrt Komponen Intalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Rp 17.722.900,00	APBD		1 paket	38.4022.800,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket dan Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	4 paket	Rp 758.851.000,00	Rp -	Rp -	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Rp 758.851.000,00	APBD		1 paket	196.925.400,00
	Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakandan dan Penggandaan yang disediakan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	12 paket	Rp 95.584.30000,00	Rp -	Rp -	Jumlah Paket Barang Cetakandan dan Penggandaan yang disediakan	Rp 96.584.300,00	APBD		1 paket	91.579.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	12 dokumen	Rp 16.680.000,00	Rp -	Rp -	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang disediakan	Rp 16.680.000,00	APBD		0 dokumen	16.880.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	12 laporan	Rp 630.057.500,00	Rp -	Rp -	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat dan konsultasi	Rp 630.057.500,00	APBD		1 laporan	631.289.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadnan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	100%	Rp 468.901.000,00	Rp -	Rp -	Jumlah Paket Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 468.901.000,00	APBD		100%	123.200.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bagunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bagunan Lainnya	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 unit	Rp 468.901.000,00	Rp -	Rp -		Rp 468.901.000,00	APBD		4 unit	217.500.000,00
	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan										1 unit	00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan administrasi, sarana & prasarana perkantoran	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	100%	Rp 826.916.400,00	Rp -	Rp -		Rp 826.916.400,00	APBD		100%	884.821.500

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Idikatif (Rp.)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan dana pagu	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan langganan telepon, air, listrik dan internet	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	12 laporan	Rp 228,596,600,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 228,596,600,00	APBD		0 laporan	253.770.400,00
	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	jumlah peralatan kerja terpelihara dgn baik,persentase ruangan /tempat kerja yg bersihTersedianya kebutuhan alat tulis kantor	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	12 laporan	Rp 578,577,000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 578,577,000,00	APBD		1 lapoean	751.184.700,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik daerah Bappedalitbang	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	12 bulan	Rp 749,127,900,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 749,127,900,00	APBD		100%	461.916.950,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, dan PajakKendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah unit terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	43 unit	Rp 374,175,900,00	Rp -	Rp -	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Rp -	Rp 374,175,900,00	APBD		0 unit	257.256.100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase Peralatan kerja yang terpelihara dengan baik	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	2 unit	Rp 374,952,000,00	Rp -	Rp -	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Rp -	Rp 374,952,000,00	APBD		3 unit	879.848.590,00
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	masyarakat (musrenbang),usulan DPRD (POKIR),serta keselarasan dokumen perencanaan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	98,8%	Rp 2.194.345.100,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.194.345.100,00	APBD		99%	2.375.078.312,00
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah hasil penyusunan perencanaan dan penganggaran dengan nilai yang baik	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	88%	Rp 1.750,337,200,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.750,337,200,00	APBD		90%	1.904.252.632,00
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen KebijakanLainnyass	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	2	Rp 174,210,000,00	Rp -	Rp -	Jumlah telaahan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah	Rp -	Rp 174,210,000,00	APBD		8 Dokumen	219.410.000,00
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah berita acara Konsultasi Publik	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	2	Rp 865,650,000,00	Rp -	Rp -	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Rp -	Rp 865,650,000,00	APBD		2 Berita Acara	331.997.000,00
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita AcaraMusrenbangKabupaten/Kota	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	2	Rp 570,550,700,00	Rp -	Rp -	Jumlah Berita acara musrenbang Kabupaten/ Kota	Rp -	Rp 570,550,700,00	APBD		3 Berita Acara	568.300.700,00
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Yang ditetapkan RPJMD,RPJMD,RKPD	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	3	Rp 1,949,197,700,00	Rp -	Rp -	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Rp -	Rp 1,949,197,700,00	APBD		9 Dokumen	1.749.873.200,00
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tingkat Keterisian Data Perencanaan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	72%	Rp 215,508,000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 215,508,000,00	APBD		74%	226,868,800,00
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen HasilAnalisis Data untukPenyusunan KebijakanPerencanaanPembangunan Daerah(Semua PerencanaanPembangunan Daerah)	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1	Rp 198,668,000,00	Rp -	Rp -	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Rp -	Rp 198,668,000,00	APBD		3 dokumen	258.188.000,00

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Idikatif (Rp.)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1	Rp 16.840.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Rp 16.840.000,00	APBD	1 buku	16.840.000,00
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi Pengendalian dan Evaluasi yang difindak lanjuti	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	100%	Rp 478.567.000,00	Rp -	Rp -	Rp -		Rp 478.567.000,00	APBD	100%	494.023,98
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	2	Rp 40.074.003,00	Rp -	Rp -	Rp -	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Rp 40.074.003,00	APBD	2 Laporan	355.160.000,00
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	10	Rp 77.827.000,00	Rp -	Rp -	Rp -		Rp 77.827.000,00	APBD	10 laporan	77.827.000,00
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian sasaran kinerja RPJMD	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	93,4%	Rp 3.753.168.400,00	Rp -	Rp -	Rp -		Rp 3.753.168.400,00	APBD	95,02%	3.885.833.601
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah perangkat daerah dengan nilai kualitas perencanaan baik	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	46	Rp 1.469.398.000,00	Rp -	Rp -	Rp -		Rp 1.469.398.000,00	APBD	72	1.461.621.233
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKKPD)	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	3	Rp 446.071.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKKPD)	Rp 446.071.000,00	APBD	2 Dokumen	628.066.000,00
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	42	Rp 173.550.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Rp 173.550.000,00	APBD	0 laporan	378.161.900,00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	84	Rp 59.895.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rp 59.895.000,00	APBD	38 Laporan	159.895.000,00
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKKPD/RPJMMD pada Bidang Pemerintahan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	42	Rp 304.131.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKKPD/RPJMMD pada Bidang Pemerintahan	Rp 304.131.000,00	APBD	100 Laporan	577.632.100,00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKKPD)	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	3 dokumen	Rp 65.541.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKKPD)	Rp 65.541.000,00	APBD	2 Dokumen	95.461.000,00

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Idikatif (Rp.)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan HasilAsistensi PenyusunanDokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah BidangPembangunan Manusia	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	6 Laporan	Rp 42.150.000,00	Rp -	Rp -	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Rp 42.150.000,00	APBD	6 Laporan	41.450.000,00	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan HasilPelaksanaan Monitoringdan Evaluasi PenyusunanDokumen PerencanaanPembangunan PerangkatDaerah BidangPembangunan Manusia	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	12 Laporan	Rp 32.450.000,00	Rp -	Rp -	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dan Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Rp 32.450.000,00	APBD	12 laporan	61.190.000,00	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renjadengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	6 Laporan	Rp 345.610.000,00	Rp -	Rp -	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Rp 345.610.000,00	APBD	100 laporan	692.811.000,00	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perkeonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah perangkat daerah dengan nilai kualitas perencanaan baik	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	8 dokumen	Rp 630.615.400,00	Rp -	Rp -		Rp 630.615.400,00	APBD	8 dokumen	673.401.474	
	Koordinasi PenyusunanDokumen PerencanaanPembangunan DaerahBidang Perkeonomian(RPJPd, RPJMD dan RKPD	Jumlah DokumenPerencanaanPembangunan DaerahBidang Perkeonomiayang DikoordinirPenyusunannya ((RPJPd,RPJMD dan RKPD)	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	3 Laporan	Rp 146.973.500,00	Rp -	Rp -	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perkeonomian yang Dikoordinir Penyusunannya	Rp 146.973.500,00	APBD	3 dokumen	231.468.000,00	
	Asistensi PenyusunanDokumen PerencanaanPembangunan PerangkatDaerah BidangPerkeonomian	Jumlah Laporan HasilAsistensi PenyusunanDokumen PerencanaanPembangunan PerangkatDaerah BidangPerkeonomian	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	8	Rp 39.520.400,00	Rp -	Rp -	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perkeonomian	Rp 39.520.400,00	APBD	12 Laporan	55.552.400,00	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat tDaerah Bidang Perkeonomian	Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perkeonomian	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	16	Rp 20.900.400,00	Rp -	Rp -	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja bidang Perkeonomian	Rp 20.900.400,00	APBD	16 laporan	33.342.400,00	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perkeonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra / renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang perkeonomian	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	8	Rp 70.711.000,00	Rp -	Rp -	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perkeonomian	Rp 70.711.000,00	APBD	12 Laporan	118.199.000,00	
	Koordinasi PenyusunanDokumen PerencanaanPembangunan DaerahBidang SDA (RPJPd, RPJMDdan RKPD)	jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaanpembangunan perangkat daerah Bidang sumber daya alam (sda)	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	3	Rp 142.672.400,00	Rp -	Rp -	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPd, RPJMD, dan RKPD)	Rp 142.672.400,00	APBD	3 Dokumen	137.042.400,00	
	Asistensi PenyusunanDokumen PerencanaanPembangunan PerangkatDaerah Bidang SDA	Jumlah dokumenpengendalian tahunberjalan dan movev tahun-2 SKPD subid sumberdaya alam dan lingkunganhidup	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	4	Rp 145.881.000,00	Rp -	Rp -	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Rp 145.881.000,00	APBD	6 Laporan	244.890.000,00	

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Idikatif (Rp.)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	8	Rp 30.233.400,00	Rp -	Rp -	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja bidang SDA	Rp 30.233.400,00	APBD		8 lporzn	30.233.400,00
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah fasilitas forum/pokja/pemangkuk penitngan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	4	Rp 33.723.300,00	Rp -	Rp -	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Rp 33.723.300,00	APBD		6 Laporan	33.723.200,00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah perangkat daerah dengan nilai kualitas perencanaan baik	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 Dokumen	Rp 1.653.155.000,00	Rp -	Rp -		Rp 1.653.155.000,00	APBD		1 dokumen	1.750.810.894
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	3	Rp 159.561.500,00	Rp -	Rp -	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Rp 159.561.500,00	APBD		2 dokumen	169.624.000,00
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	6	Rp 17.426.000,00	Rp -	Rp -	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Rp 17.426.000,00	APBD		2 Laporan	18.350.000,00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi (dokumen pengendalian tahun berjalan dan monev tahun n-2 SKPD) subsidi infrastruktur dan kewilayahan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	12	Rp 29.321.500,00	Rp -	Rp -	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan	Rp 29.321.500,00	APBD		6 Laporan	32.566.000,00

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Idikatif (Rp.)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra / Renja dengan RKPD/RPJMD bidang infrastruktur	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	4	Rp 210.298.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Rp 210.298.000,00	APBD	5 Laporan	226.465.000,00
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan HasilSinkronisasi Renstra/Renjadengan RKPD/RPJMD padaBidang Kewilayahan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	2	Rp 1.236.548.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Rp 1.236.548.000,00	APBD	5 Laporan	1.209.263.000,00
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kajian kelitbang yang difindaklajuti	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	55	Rp 2.680.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	-	Rp 2.680.000.000,00	APBD	55	2.659.378.910,00
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah ringkasan penelitian dan pengembangan tahunan / policy paper	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	2 Laporan	Rp 939.497.400,00	Rp -	Rp -	Rp -	-	Rp 939.497.400,00	APBD	2 dokumen	966.973.410,00
	Fasilitasi,Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum		Bappedalitbang Kabupaten Balangan	3 dokumen	Rp 774.963.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	-	Rp 774.963.000,00	APBD	2 Laporan	400.120.000,00
	Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangandan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 dok	Rp 164.534.400,00	Rp -	Rp -	Rp -	-	Rp 164.534.400,00	APBD	1 Laporan	232.153.000,00
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	<i>Tingkat pemanfaatan hasil kelitbang yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan</i>										100%	179.880.000,00
	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hai; Penelitian dan Pengembangan Tenaga kerja										1 Dokumen	179.880.000,00
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah ringkasan penelitian dan pengembangan tahunan / policy paper	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	10 dokumen	Rp 371.073.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	-	Rp 371.073.000,00	APBD	1 dokumen	998.073.000,00
	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah											1 Dokumen	170.070.000,00
	Penelitian dan Pengembangan pertanian,perkebunan dan pangan	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 Dokumen	Rp 374.910.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	-	Rp 374.910.000,00	APBD	1 dokumen	180.030.000,00
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi pelaksanaan an evaluasi penelitian dan pengembangan bidang kelembagaan dan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	3 dokumen	Rp 775.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	-	Rp 775.000.000,00	APBD	1 dokumen	330.030.000,00
	Penelitian danPengembangan PenataanRuang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen HasilPenelitian danPengembangan PenataanRuang dan Pertanahan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	2 Dokumen	Rp 371.073.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	-	Rp 371.073.000,00	APBD	3 Dokumen	998.073.000,00
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi dan teknologi yg dijaring	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 Laporan	Rp 1.044.469.600,00	Rp -	Rp -	Rp -	-	Rp 1.044.469.600,00	APBD	1 laporan	1.094.372.500,00
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan MetodePenyelenggaraanPemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur danMetode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 Laporan	Rp 588.559.600,00	Rp -	Rp -	Rp -	-	Rp 588.559.600,00	APBD	1 laporan	2.367.636.500,00

	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 Dokumen	Rp	405.960.000,00	Rp	-	Rp	-	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Rp	405.960.000,00	APBD	2 Dokumen	306.023.000,00
--	---	---	-----------------------------------	-----------	----	----------------	----	---	----	---	---	----	----------------	------	-----------	----------------

Kepala Bapperida

H. Rakhmadi Yusni, S.Sos, M.AP
Nip. 19701207 199505 1 002

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah,(Bapperida) Kabupaten Balangan dalam menyusun program dan kegiatan terlebih dahulu menampung aspirasi dari para pemangku kepentingan, Tokoh masyarakat dan agama, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun juga hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten.

Pelaksanaan musrenbang diharapkan agar memberi banyak manfaat dalam mengakomodir usulan-usulan masyarakat. Hasil musrenbang, baik itu tingkat desa, kelurahan, kecamatan dan kabupaten hendaknya mendapat porsi perhatian yang besar untuk diakomodir pada renja SKPD dan menjadi bahan penyusun RKPD. Semakin banyak usulan yang diakomodir oleh SKPD berdasarkan skala prioritas dan arah pembangunan diharapkan memacu masyarakat untuk turut aktif menggali, menyusun dan memperjuangkan usulan yang benar-benar bermanfaat langsung dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Bapperida dalam hal ini akan berupaya memperbaiki pelaksanaan musrenbang dan mengawal penyusunan Renja SKPD serta memastikan usulan musrenbang masuk dalam RKPD dengan tetap memperhatikan sasaran, arah dan kebijakan pembangunan di Kabupaten Balangan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaan terhadap Kebijakan Nasional

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

1) Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional tahun 2024

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down, holistik-tematik, integratif, dan spasial. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024 “**Pemulihan Ekonomi dan Reformasi struktural**” maka Prioritas nasional yang harus dicapai pada akhir tahun 2023, sesuai dengan Rancangan RKP Tahun 2024, antara lain :

1. Prioritas Nasional 1 Memperkuat katahana ekonomi dan Pertumbuhan yang Berkualitas.
2. Prioritas Nasional 2 mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan Menjamin Pemerataan
3. Prioritas Nasional 3 Meningkatkan SDM berkualitas dan Berdaya Saing
4. Prioritas Nasional 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Prioritas Nasioanl 5 Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Prioritas Nasional 6 Membangun Lingkungan hidup,Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Prioritas Nasional 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Tahun 2025 akan menjadi tahun kunci bagi pemulihan ekonomi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah-panjang, menjadi negara berpendapatan tinggi sebelum tahun 2045. Pemulihan ekonomi diarahkan untuk memulihkan daya beli masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan permintaan agregat. Upaya pemulihan juga dilakukan melalui diversifikasi ekonomi untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor yang terkena dampak besar dari Covid-19 dan mendorong sektor lain yang berpotensi tumbuh lebih cepat.

(1) Di samping pemulihan ekonomi, peningkatan daya saing juga akan terus dilakukan melalui reformasi struktural. Agenda reformasi struktural akan mempercepat pemulihan dan membentuk perekonomian yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Pemulihan Daya Beli Masyarakat dan Dunia Usaha

Penuntasan krisis kesehatan. Terkendalinya pandemi Covid-19 menjadi faktor utama pemulihan ekonomi. Penurunan kasus Covid-19 dan vaksinasi yang berjalan cepat akan mendorong tingkat keyakinan masyarakat dan dunia usaha untuk kembali melakukan aktivitas ekonomi secara normal.

Pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha. Pandemi Covid-19 berdampak besar terhadap kondisi dunia usaha, terutama UMKM. Kondisi dunia usaha yang belum sepenuhnya pulih masih perlu diberikan bantuan untuk mengakselerasi proses pemulihan ekonomi. Bantuan diberikan terutama untuk mendorong peningkatan investasi dan diarahkan pada sektor yang terkena dampak besar, seperti sektor pariwisata dan industri.

Pemberian bantuan untuk menjaga daya beli rumah tangga. Bantuan sosial masih dibutuhkan terutama untuk membantu masyarakat yang masih belum sepenuhnya kembali bekerja dan mengalami penurunan pendapatan. Bantuan pelatihan prakerja akan meningkatkan keterampilan dan menjaga tingkat produktivitas tenaga kerja yang dapat membantu mempercepat pencarian pekerjaan.

Percepatan pembangunan infrastruktur secara padat karya. Selain membantu meningkatkan daya beli masyarakat, pembangunan infrastruktur juga akan berkontribusi bagi peningkatan investasi. **Program khusus.** Program khusus dapat diarahkan pada program lain yang dapat mendorong peningkatan permintaan agregat. Salah satu kebijakan yang dapat dilakukan adalah memastikan kembalinya murid ke sekolah (pembelajaran *offline*). Selain murid mendapatkan pembelajaran yang lebih baik, kembalinya murid ke sekolah dapat memberikan ketenangan kepada orang tua untuk kembali melakukan aktivitasnya secara normal.

(2) Diversifikasi Ekonomi

Upaya diversifikasi ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi dilakukan dengan cara peningkatan nilai tambah melalui peningkatan kontribusi industri pengolahan dan pengembangan produk pertanian. Peningkatan produksi pangan dilakukan melalui pembangunan *food estate*. Pemulihan dan peningkatan daya saing ekonomi dilakukan dengan menerapkan konsep pembangunan rendah karbon (*green recovery*). Di samping itu, dilakukan transformasi menuju ekonomi digital melalui langkah-langkah perluasan, pemerataan, dan peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan digital.

(3) Reformasi Struktural

Agenda reformasi struktural tetap akan dilaksanakan pada 2022. Perbaikan iklim investasi akan terus dilanjutkan dengan memastikan implementasi UU Cipta Kerja dan melanjutkan pembangunan infrastruktur ekonomi yang sempat tertunda. Reformasi kelembagaan dan tata kelola dilakukan, antara lain dengan mendorong reformasi birokrasi dan penyempurnaan ekosistem inovasi dan pengetahuan. Peningkatan kualitas SDM, terutama untuk menghadapi tantangan digitalisasi dan perubahan pekerjaan ke depan (*future of work*), dilakukan melalui perbaikan sistem kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

2) Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024

Rencana pembangunan di tahun 2024, pemerintah provinsi Kalimantan Selatan telah merumuskan tema, yaitu: **“Memantapkan Daya Saing Ekonomi dan Sosial dengan memperhatikan Lingkungan”**. Oleh sebab itu, pembangunan di tahun 2024 ini lebih berorientasi pada pembangunan infrastruktur dan memperkuat

komponen pokok pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan investasi dan daya saing daerah. Program-program yang mendukung Akselerasi dan pencapaian visi pembangunan Kalimantan selatan, yaitu KALSEL MAPAN (mandiri dan terdepan) lebih sejahtera, berkeadilan, berkelanjutan, berdikari dan berdaya saing.

6 prioritas daerah yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi tersebut antara lain:

1. Hilirisasi industry , peningkatan sector pertanian dan pariwisata , dengan sasaran meningkatkan angka harapan hidup dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi
2. Pemantapan system ketahanan bencana (Banjir dan Karhutla) Perbaikan Lingkungan Hidup
3. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pendukung Kawasan Perekonomian

4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Terutama Kemudahan dalam Perizinan Berinvestasi
5. Peningkatan SDM Melalui Perkuatan Sistem Kesehatan, Peningkatan Kualitas Pendidikan, Peningkatan Keterampilan, dan Penanganan Masalah Sosial
6. Pengembangan Kalsel Sebagai Gerbang dari Food Estate dan Ibu Kota Negara Baru

3) Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Balangan tahun 2024 berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026

Perencanaan pembangunan daerah kabupaten tidak dapat terlepas dari arah dan kebijakan perencanaan pembangunan pusat dan provinsi. Perencanaan pembangunan daerah kabupaten merupakan penjabaran pelaksanaan pembangunan provinsi dan pusat. Dengan berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJPD Kabupaten

Balangan, RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2022, permasalahan di Kabupaten Balangan, serta kerangka ekonomi daerah dan pendanaan maka tema pembangunan Kabupaten Balangan tahun 2024 adalah “ **Peningkatan Kualitas Layanan Masyarakat Melalui Pengembangan Infrastruktur Desa dan Penataan Kota Paringin Serta Peningkatan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Terhadap Dampak Pandemi Covid-19** “. Berdasarkan tema tersebut, maka dibuat 6 (enam) Prioritas dan Sasaran Pembangunan pada Tahun 2024, yaitu sebagai berikut :

1. Prioritas 1 : Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan Paringin, dengan sasaran sebagai berikut :

- a. Pengembangan Infrastruktur Desa
- b. Pengembangan Infrastruktur Perkotaan

2. Prioritas 2 : Peningkatan vaksinasi dan penanganan covid-19, dengan sasaran sebagai berikut :

- a. Optimalisasi peran dan fungsi Satgas Covid Kabupaten Balangan
- b. Peningkatan vaksinasi Covid-19
- c. Peningkatan sarana dan prasarana dalam penanggulangan Covid-19. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat terdampak covid 19

Prioritas 3 : Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif, dengan sasaran sebagai berikut :

- a. Revitalisasi dan penataan serta perluasan pasar-pasar tradisional Pasar Modern Adaro, Pasar Halong, Pasar Uren, dan Pasar Mauya;
- b. Mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dibidang perdagangan karet (buffer stock);
- c. Penyediaan cadangan pangan dan kesiapsiagaan bencana
- ;d. Pengembangan Desa Wisata Liyu (sarana dan prasarana serta SDM

e. Pengembangan sentra perikanan di kawasan transmigrasi menjadi Desa Iwak

f. Optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) – Pelatihan alat berat, garmenserta tempat pemagangan dan sentra pelayanan jasa khususnya kebutuhan pemkab

g. Pemberdayaan dan pengembangan UMKM serta pengembangan sentra IKM

h. Di bidang Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan:

- Peningkatan sarana dan prasarana Peternakan (4.693 Ekor)
- Peningkatan Produktivitas Sayur dan Produktivitas Buah
- Pembinaan Kelompok Wanita Tani (KWT)
- Pelayanan kesehatan Hewan
- Peningkatan Produktifitas Padi sawah (3,6 Ton/Ha)
- Peningkatan Produktifitas padi gogo (2,7 Ton/Ha)
- Peningkatan Produktifitas Jagung Hibrida (4.6 Ton/Ha)
- Hibah Sarana Perkebunan 85 UPPB / KT
- Rehabilitasi Perkebunan (Karet) 75 Ha
- Peningkatan kelas Kelompok Tani
- Pembinaan UPBB (23 UPBB/KT)

4. Prioritas 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan, dengan sasaran sebagai berikut :

a. Pemberian bantuan khusus bagi siswa yang tidak mampu/miskin agar dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi melalui program Kartu Balangan Pintar

b. Pemberian beasiswa bagi siswa/mahasiswa yang berprestasi

- c. Peningkatan sarana prasarana Pendidikan (rehabilitasi 8 SDN dan 2 SD Kecil, Pembangunan Laboratorium SMP)
 - d. Tunjangan Daerah bagi guru/pendidik
 - e. Fasilitasi kemudahan akses pendirian dan legalitas Yayasan Paud
 - f. Pengobatan gratis bagi warga Balangan yang diperluas, cukup menunjukkan KTP dan/atau KK Balangan
 - g. Rehabilitasi 5 puskesmas pembantu yang rusak berat (Pelajau, Kedondong, Inan, Muara Ninian, Hauwai)
 - h. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan serta bantuan khusus bagi ibu hamil, balita, dan ibu menyusui.
 - i. Pengembangan RSUD Balangan (APBD/APBN)
 - j. Pembangunan POSKESDES Desa Mamigang
 - k. Program Puskesmas Keliling
 - l. peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap (pembangunan ruang perawatan puskesmas awayan)
5. Prioritas 5 : Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara, dengan sasaran sebagai berikut :
- a. Penyederhanaan SKPD dari 33 SKPD menjadi 22 SKPD (di luar kecamatan) tahun 2020.
 - b. Optimalisasi fungsi dan peran ASN sebagai pelayan masyarakat melalui peningkatan profesionalisme ASN.
 - c. Peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat
 - d. Implementasi penyederhanaan birokrasi kepada seluruh jabatan administrasi (eselon IV) di seluruh Perangkat Daerah
6. Prioritas 6 : Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif, dengan sasaran sebagai berikut :

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Tujuan dan sasaran mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan perangkat daerah secara keseluruhan. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan perangkat daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan perangkat daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Bappeda untuk periode 5 (lima) tahun.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Daerah, Bappeda kabupaten Balangan telah merumuskan tujuan dan sasaran yang dirumuskan dalam Renstra Bappelitbangda, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Kinerja Pembangunan Daerah :
 1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Nilai Baik

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bappelitbangda kabupaten Balangan dengan dokumen RPJMD 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Bappelitbangda kabupaten Balangan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Bappelitbangda yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Bappelitbangda sebagai perangkat daerah yang melaksanakan tugas mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah akan mengawal secara langsung sesuai bidang/sector serta kewilayahan yang berada pada porsi yang sesuai dengan tugas pokok dan uraian tugas unsur-unsur Organisasi BAPPELITBANGDA. Sedangkan secara teknis berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi

Pemerintah kabupaten Balangan, Bappelitbangda berkontribusi secara teknik untuk mewujudkan Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut:

A. Misi Keempat : Meningkatkan Kualitas Dan Layanan Birokrasi Pemerintahan Sebagai Abdi Masyarakat Dan Abdi Negara, mempunyai *tujuan* Meningkatkan kualitas perencanaan & inovasi daerah, dengan sasaran :

1. Meningkatnya Perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, dengan indikator dan target yang ingin dicapai adalah :
 - a) **Nilai / predikat akuntabilitas kinerja** pada tahun 2021 sebesar 68 ; tahun 2022 sebesar 69 ; tahun 2023 sebesar 70 ; tahun 2024 sebesar 72 ; tahun 2025 sebesar 73 dan tahun 2026 mencapai 75. Perangkat daerah penanggung jawab : Bappelitbangda dan semua perangkat daerah .
 - b) **Persentase Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah yg baik dan tepat waktu** dengan target masing-masing pada tahun 2021 sebesar 93,00 % ; tahun 2022 sebesar 94,00 % ; tahun 2023 sebesar 95,00 % ; tahun 2024 sebesar 96,00 % ; tahun 2025 sebesar 97,00% dan tahun 2026 mencapai 98,00 %. Penanggung jawab : Bappeda bidang perencanaan makro dan pengendalian.
 - c) **Persentase dokumen perencanaan SKPD dengan nilai baik dan tepat waktu (bidang ekonomi, Infrastruktur & kewilayahan)** masing-masing pada tahun 2021 sebesar 93,00 % ; tahun 2022 sebesar 94,00 % ; tahun 2023 sebesar 95,00 % ; tahun 2024 sebesar 96,00 % ; tahun 2025 sebesar 97,00% dan tahun 2026 mencapai 98,00 %. Penanggung jawab : Bappeda bidang ekonomi, infrastruktur & kewilayahan.
 - d) **Persentase dokumen perencanaan SKPD dengan nilai baik dan tepat waktu (bidang pemerintahan & pembangunan manusia)** masing-masing pada tahun 2021 sebesar 93,00 % ; tahun 2022 sebesar 94,00 % ; tahun 2023 sebesar 95,00 % ; tahun 2024 sebesar 96,00 % ; tahun 2025 sebesar 97,00% dan tahun 2026 mencapai 98,00 %. Penanggung jawab : Bappeda bidang pemerintahan & pembangunan manusia.

2. Meningkatnya Inovasi Daerah, dengan indicator dan target yang ingin dicapai adalah :

- a) Persentase penelitian dan pengembangan daerah yg dimanfaatkan dengan target masing-masing pada tahun 2021 sebesar 70,00 % ; tahun 2022 sebesar 75,00 % ; tahun 2023 sebesar 80,00 % ; tahun 2024 sebesar 85,00 % ; tahun 2025 sebesar 90,00% dan tahun 2026 mencapai 95,00 %.
penanggung jawab : Bappelitbangda bidang penelitian, pengembangan dan inovasi daerah.
- b) Persentase inovasi daerah yg berkelanjutan dengan target masing-masing pada tahun 2021 sebesar 35 angka ; tahun 2022 sebesar 40 angka ; tahun 2023 sebesar 45 ; tahun 2024 sebesar 50 angka ; tahun 2025 sebesar 55 angka dan tahun 2026 mencapai 60 angka. penanggung jawab : Bappelitbangda bidang penelitian, pengembangan dan inovasi daerah.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 terdiri atas **Program dan Kegiatan** sebanyak **4 program** dan **16 kegiatan** yang meliputi :

1. *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota dengan kegiatan*

- a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat Daerah
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - g) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor
2. *Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan kegiatan*
- a) *Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan*
 - b) *Analisa data dan Informasi Pemerintahan Daerah bidang Perencanaan Pembangunan Daerah*
 - c) *Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan bidang perencanaan Pembangunan Daerah*
3. *Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan*
- a) *Koordinasi Perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia*
 - b) *Koordinasi Perencanaan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)*
 - c) *Koordinasi Perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan*
4. *Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan kegiatan*
- a) *Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan*
 - b) *Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan*
 - c) *Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan*
 - d) *Pengembangan Inovasi dan Teknologi*

- e) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat Daerah
 - f) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - g) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - h) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - i) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - j) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - k) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor
5. *Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan kegiatan*
- a) *Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan*
 - b) *Analisa data dan Informasi Pemerintahan Daerah bidang Perencanaan Pembangunan Daerah*
 - c) *Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan bidang perencanaan Pembangunan Daerah*
6. *Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan*
- a) *Koordinasi Perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia*
 - b) *Koordinasi Perencanaan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)*
 - c) *Koordinasi Perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan*
7. *Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan kegiatan*
- a) *Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan*
 - b) *Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan*
 - c) *Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan*
 - d) *Pengembangan Inovasi dan Teknologi*

- e) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat Daerah
 - f) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - g) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - h) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - i) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - j) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - k) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor
8. *Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan kegiatan*
- a) *Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan*
 - b) *Analisa data dan Informasi Pemerintahan Daerah bidang Perencanaan Pembangunan Daerah*
 - c) *Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan bidang perencanaan Pembangunan Daerah*
9. *Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan*
- a) *Koordinasi Perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia*
 - b) *Koordinasi Perencanaan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)*
 - c) *Koordinasi Perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan*
10. *Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan kegiatan*
- a) *Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan*
 - b) *Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan*
 - c) *Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan*
 - d) *Pengembangan Inovasi dan Teknologi*

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Adapun total kebutuhan dana/pagu indikatif yang diperlukan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2025 berjumlah Rp.24.806.537.609.00 yang berisi program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, lokasi, target capaian kinerja, kebutuhan dana/pagu indikatif, sumber dana, beserta prakiraan maju (proyeksi) rencana tahun 2025. Rumusan rencana program dan kegiatan Bapperida Tahun 2025 sebagaimana disajikan dalam Tabel TC.33

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Ranhir Renja Bapperida Kabupaten Balangan Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2024, dimana RKPD Tahun 2024 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih secara umum Bappeda bertugas mengkoordinasikan pencapaian misi kelima, yaitu " Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai – Nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Melaksanakan program prioritas dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Balangan baik dalam fungsi koordinatif, maupun pelaksanaan oleh Bappedalitbang secara langsung;
4. Melaksanakan program prioritas dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Balangan baik dalam fungsi koordinatif, maupun pelaksanaan oleh Bappedalitbang secara langsung;
5. Merespon isu – isu strategis Bappedalitbang Kabupaten Balangan termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemic COVID -19;
6. Keserasian dan keterpaduan pembangun, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya pemerintahan serta infastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kabupaten Balangan;
7. Ketersediaan data dan Informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
8. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efiktifitas pelaksanaan program / kegiatan;
9. Sumber – sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada RenjaBapperida Kabupaten Balangan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Bappedalitbang Kabupaten Balangan Tahun 2024 adalah 4 program 16 kegiatan dan 59 subkegiatan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Bappedalitbang Kabupaten Balangan;



3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Bappedalitbang pada tahun 2024 adalah sebanyak 59 subkegiatan
4. Jumlah total kebutuhan / pagu idikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pada Renja Bappedalitbang Kabupaten Balangan Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 15.967.397.285,-

Rencana Program dan Kegiatan Bapperida kabupaten balangan 2024 berisi program, kegiatan dan subkegiatan baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten balangan. Program dan Kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah(Renja- PD)

Rencana kerja berupa Program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah tahun 2024. Tahun 2024 bapperida akan melaksanakan 4 program 16 kegiatan dan 59 subkegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.21.056.536.066

Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi perencanaan yang menjadi kewenangan Bapperida dapat dilihat pada tabel 3.1.

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Bapperida Kabupaten Balangan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, sehingga terdapat keselarasan antar dokumen perencanaan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah.

Ranhir Renja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Kabupaten Balangan Tahun 2025 ini menjadi pedoman dalam Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta acuan dalam bagi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan dalam menjalankan Tugas dan Fungsi serta sasaran dan target Pembangunan yang diamatkan Kepada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan .

Penyusunan Renja didasarkan pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 sebagaimana di mutakhirkan terakhir Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta memperhatikan skala prioritas yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai yang telah di rencanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

Paringin, 2024

**Kepala Bapperida
Kabupaten Balangan,**

H. Rakhmadi Yusni S.Sos.M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 197012071995031002



Tabel TC. 33

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BAPPEDALITBANG TAHUN ANGGARAN 2024
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025
BAPPEDALITBANG KAB BALANGAN**

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Belanja Pegawai	Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu	
	(2)						Rp 20,822.804,979,00				Rp -	Rp 20,822,804,979,00			24.806.537.609.00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	69	Rp -	Rp 10,135,953,179,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 10,135,953,179,00	APBD	72	9.632.671.770	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	100%	Rp -	Rp 213.850.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 213.850.000,00	APBD	100%	245.927.500	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	2 Dokumen	Rp -	Rp 20.750.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 20.750.000,00	APBD	5 Dokumen	20.750.000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	4 Dokumen	Rp -	Rp 55.820.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 55.820.000,00	APBD	8 laporan	217.050.000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	4 laporan	Rp -	Rp 137.280.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 137.280.000,00	APBD	4 Laporan	105.180.000.00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	100%	Rp -	Rp 6,019,762,179,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 6,019,762,179,00	APBD	100%	6.703.027.130	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	33 orang	Rp -	Rp 5.904,446,979,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.904,446,979,00	APBD	33 orang	7.620.242.336.00	
	Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	12 Dokumen	Rp -	Rp 94,015,200,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 94,015,200,00	APBD	2 Dokumen	211.825.083.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Akhir	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 laporan	Rp -	Rp 14,200,000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 14,200,000,00	APBD	1 laporan	14.200.000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Bulanan/ Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semester	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 laporan	Rp -	Rp 7,100,000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 7,100,000,00	APBD	1 laporan	7.100.000.00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	100%	Rp -	Rp 337.500.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 337.500.000,00	APBD	100%	388.125.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 paket	Rp -	Rp 97.100.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 97.100.000,00	APBD	200 paket	106.810.000.00	

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	33 orang	Rp - Rp	240.400.000,00	Rp - Rp	Rp - Rp	Rp - Rp	240.400.000,00	APBD	50 orang	240.000.000.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	100%	Rp - Rp	1.519.895.700,00	Rp - Rp	Rp - Rp	Rp - Rp	1.519.895.700,00	APBD	100%	825.653.690
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	12 paket	Rp - Rp	17.722.900,00	Rp - Rp	Rp - Rp	Rp - Rp	17.722.900,00	APBD	1 paket	38.402.800.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	4 paket	Rp - Rp	758.851.000,00	Rp - Rp	Rp - Rp	Rp - Rp	758.851.000,00	APBD	1 paket	196.925.400.00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	12 paket	Rp - Rp	96.584.300,00	Rp - Rp	Rp - Rp	Rp - Rp	96.584.300,00	APBD	1 paket	91.579.000.00
	Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	12 Dokumen	Rp - Rp	16.680.000,00	Rp - Rp	Rp - Rp	Rp - Rp	16.680.000,00	APBD	0 Dokumen	16.680.000.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	12 laporan	Rp - Rp	630.057.500,00	Rp - Rp	Rp - Rp	Rp - Rp	630.057.500,00	APBD	12 laporan	502.261.100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	100%	Rp - Rp	468.901.000,00	Rp - Rp	Rp - Rp	Rp - Rp	468.901.000,00	APBD	100%	123.200.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 unit	Rp - Rp	468.901.000,00	Rp - Rp	Rp - Rp	Rp - Rp	468.901.000,00	APBD	4 unit	217.500.000.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang baik	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	100%	Rp - Rp	826.916.400,00	Rp - Rp	Rp - Rp	Rp - Rp	826.916.400,00	APBD	100%	884.821.500
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	12 Laporan	Rp - Rp	228.596.600,00	Rp - Rp	Rp - Rp	Rp - Rp	228.596.600,00	APBD	0 Laporan	253.770.400.00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	12 Laporan	Rp - Rp	598.319.800,00	Rp - Rp	Rp - Rp	Rp - Rp	598.319.800,00	APBD	1 Laporan	751.184.700.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	100%	Rp - Rp	749.127.900,00	Rp - Rp	Rp - Rp	Rp - Rp	749.127.900,00	APBD	100%	461.916.950
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	43 unit	Rp - Rp	374.175.900,00	Rp - Rp	Rp - Rp	Rp - Rp	374.175.900,00	APBD	0 unit	257.256.100.00
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	2 unit	Rp - Rp	374.952.000,00	Rp - Rp	Rp - Rp	Rp - Rp	374.952.000,00	APBD	3 unit	879.848.590.00
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Daerah (kinerja program/kinerja urusan)	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	100%	Rp - Rp	4.253.683.400,00	Rp - Rp	Rp - Rp	Rp - Rp	4.253.683.400,00	APBD	100%	4.434.416.612

	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase hasil penyusunan perencanaan dan penganggaran dengan nilai baik	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	100%	Rp	-	Rp	3,559,608,400,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	3,559,608,400,00	APBD	100%	3,713,523,832
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	2	Rp	-	Rp	174.210.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	174.210.000,00	APBD	8 Dokumen	219.410.000.00
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	2	Rp	-	Rp	865.650.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	865.650.000,00	APBD	2 Berita Acara	331.997.000.00
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	2	Rp	-	Rp	570.550.700,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	570.550.700,00	APBD	3 Berita acara	568.300.700.00
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	3	Rp	-	Rp	1,949,197,700,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	1,949,197,700,00	APBD	9 Dokumen	1,749,873,200.00
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase data dan informasi perencanaan dan pembangunan daerah yang tervalidasi	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	74%	Rp	-	Rp	215,508,000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	215,508,000,00	APBD	74%	226,868,800
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1	Rp	-	Rp	198.668.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	198,668,000,00	APBD	3 Dokumen	268.188.000.00
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1	Rp	-	Rp	16.840.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	16,840,000,00	APBD	1 Buku	16.840.000.00
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi Pengendalian dan Evaluasi yang ditindak lanjuti	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	100	Rp	-	Rp	478,567,000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	478,567,000,00	APBD	100	494,023,980
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	2	Rp	-	Rp	400,740,000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	400,740,000,00	APBD	2 Laporan	355.160.000.00
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	10	Rp	-	Rp	77.827.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	77.827.000,00	APBD	10 Laporan	77.827.000.00
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian sasaran kinerja RPJMD	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	94,2%	Rp	-	Rp	3,753,168,400,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	3,753,168,400,00	APBD	95,0%	3,885,833,705
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai kualitas perencanaan baik (gakor pemerintahan dan pembangunan manusia)	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	48	Rp	-	Rp	1.469.398.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	1,469,398,000,00	APBD	72	1,461,621,233
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	3	Rp	-	Rp	446.071.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	446,071,000,00	APBD	2 Dokumen	628066.000.00

	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	42	Rp	-	Rp	173.550.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	173.550.000,00	APBD	0 Laporan	376.161.900.00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	84	Rp	-	Rp	59.895.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	59.895.000,00	APBD	38 Laporan	159.895.000.00
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	42	Rp	-	Rp	304.131.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	304.131.000,00	APBD	100 Laporan	577.632.000.00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	3	Rp	-	Rp	65.541.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	65.541.000,00	APBD	2 Dokumen	95.461.000.00
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	6	Rp	-	Rp	42.150.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	42.150.000,00	APBD	6 Laporan	41.450.000.00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	12	Rp	-	Rp	32.450.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	32.450.000,00	APBD	12 Laporan	61.190.000.00
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan manusia	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	6	Rp	-	Rp	345.610.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	345.610.000,00	APBD	100 Laporan	692.811.000.00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah dengan nilai kualitas perencanaan baik (gakor ekonomi dan SDA)	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	12	Rp	-	Rp	630.615.400,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	630.615.400,00	APBD	18	673.401.474
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	3	Rp	-	Rp	146.973.500,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	146.973.500,00	APBD	3 Dokumen	231.468.000.00
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	8	Rp	-	Rp	39.520.400,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	39.520.400,00	APBD	12 Laporan	55.552.400.00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	16	Rp	-	Rp	20.900.400,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	20.900.400,00	APBD	16 Laporan	33.342.400.00
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra/ renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang perekonomian	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	8	Rp	-	Rp	70.711.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	70.711.000,00	APBD	12 Laporan	188.199.000.00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang SDA yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD,RPJMD,dan RKPD)	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	3	Rp	-	Rp	142.672.400,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	142.672.400,00	APBD	3 Dokumen	137.042.400.00

	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	4	Rp	Rp	145.881.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	145.881.000,00	APBD	6 Laporan	244.890.000.00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	8	Rp	Rp	30.233.400,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	30.233.400,00	APBD	8 Laporan	30.233.400.00
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan hasil sikronisasi renstra / renja / dengan RKPD/RPJMD pada bidang SDA	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	4	Rp	Rp	33.723.300,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	33.723.300,00	APBD	6 Laporan	33.723.200.00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah dengan nilai kualitas perencanaan baik (gakor infrastruktur dan Kewilayahan)	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	6	Rp	Rp	1.653.155.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	1.653.155.000,00	APBD	9	1.750.810.998
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	3	Rp	Rp	159.561.500,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	159.561.500,00	APBD	2 dokumen	169.624.000.00
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	6	Rp	Rp	17.426.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	17.426.000,00	APBD	2 laporan	18.350.000.00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang Infrastruktur	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	12	Rp	Rp	29.321.500,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	29.321.500,00	APBD	6 Laporan	32.586.000.00
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Infrastruktur	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	4	Rp	Rp	210.298.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	210.298.000,00	APBD	5 Laporan	226.465.000.00
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi renstra / renja dengan RKPD /RPJMD Pada bidang kewilayahan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	2	Rp	Rp	1.236.548.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	1.236.548.000,00	APBD	5 Laporan	1.209.263.000.00
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil kelibngan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	100%	Rp	Rp	311,367,100,00-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	311,367,100,00-	APBD	100%	2,796,614,910
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Nilai Inovasi SKPD	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	55	Rp	Rp	2.680,000,000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	2.680,000,000,00	APBD	55	2,659,378,910
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah ringkasan penelitian dan pengembangan tahunan/ policy paper	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	2 Dokumen	Rp	Rp	939.497.400,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	939.497.400,00	APBD	2 dokumen	966.973.410
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	3 dok	Rp	Rp	774.963.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	774.963.000,00	APBD	2 Laporan	400.120.000.00

	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1lap	Rp - Rp	164.534.400,00	Rp - Rp	- Rp	- Rp	164.534.400,00	APBD	1 Laporan	232.153.000.00
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Tingkat pemanfaatan hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan										100%	179.880.000.00
	Penelitian dan pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen hasil penelitian dan Pengembangan Tenaga kerja										1 Dokumen	179.880.000.00
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah ringkasan penelitian dan pengembangan tahunan/ policy paper	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	3 dok	Rp - Rp	745.983.000,00	Rp - Rp	- Rp	- Rp	745.983.000,00	APBD	1 dokumen	735.309.000
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 dok	Rp	374.910.000,00				Rp 374.910.000,00	APBD	1 dok	180.030.000.00
	Penelitian dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan badan usaha milik daerah										1 dok	170.070.000.00
	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	2 dok	Rp - Rp	371.073.000,00	Rp - Rp	- Rp	- Rp	Rp 371.073.000,00	APBD	2 Dok	521.073.000.00
	Penelitian dan pengembangan pekerjaan umum	Jumlah Dokumen hasil penelitian dan pengembangan pekerjaan umum										1 Dok	330.030.000.00
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi dan teknologi yg di jaring	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	365	Rp - Rp	994.519.600,00	Rp - Rp	- Rp	- Rp	994.519.600,00	APBD	370	1.094.332.500
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 lap	Rp - Rp	588.559.600,00	Rp - Rp	- Rp	- Rp	588.559.600,00	APBD	1 Laporan	2.367.636.500.00
	Penelitian, Pengembangan dan Perekeyasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekeyasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	2 dok	Rp - Rp	405.960.000,00	Rp - Rp	- Rp	- Rp	405.960.000,00	APBD	2 Dokumen	306.023.000.00

Kepala Bapperida,

H. Rakhmadi Yusni, S.Sos, M.AP
NIP. 19701207 199503 1 002

**Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Bapperida Tahun 2024
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
Bapperida Kab. Balangan**

Kepala Bapperida

H.Rakhmadi Yusni,S.Sos.M.AP
Nip.19701207 199503 1 002





Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Restra Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Target Kineja Hasil program dan Keluaran KEGIATAN S/D Dengan Tahun (n-3)2022		Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023			
			4	Rp	5	Rp	6	Rp	7	Realisasi Renja Per 2
1	2	3	4	Rp	5	Rp	6	Rp	7	
	Urusan									
	Bidang Urusan									
01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai (Predika) Akuntabilitas Kinerja	100	83.317.314.576	100	12.880.389.110	70	9.922.326.566	71	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentasi ketersediaan dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat Daerah	100	1.069.756.228	100	106.703.600	100	154.222.400	100	
01	02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	18	326.586.387	3	32.179.350	2	16.728.000	2
01	07	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA, SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA dan SKPD	24	371.369.680	4	27.409.700	4	44.547.200	4

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Restra Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Target Kineja Hasil program dan Keluaran KEGIATAN S/D Dengan Tahun (n-3)2022					
			4	Rp	5	Rp	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	6	Rp	Realisasi Renja Per
1	2	3	4	Rp	5	Rp	6	Rp	7	2
01	11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	58.484.061	2	7.639.400	1	5.604.500	1	
01	12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12	58.511.534	2	8.939.450	1	5.604.500	1	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	1.112.409.180	100	993.944.950	100	125.180.000	100	
01	13	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	330	259.936.200	-	42.750.000	1	30.000.000	1	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Restra Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Target Kineja Hasil program dan Keluaran KEGIATAN S/D Dengan Tahun (n-3)2022					
			4	Rp	5	Rp	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	6	Rp	Realisasi Renja Per 2
1	2	3	4	Rp	5	Rp	6	Rp	7	
01	20	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72	406.460.458	12	102.136.600	12	102.598.800	12	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	72	62.348.064	12	8.640.000	12	9.435.200	12	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	1.992.297.580	12	518.130.892	12	712.970.600	12	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	5	843.054.000	1	210.118.000	100,00%	210.118.000	100,00%	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Restra Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Target Kineja Hasil program dan Keluaran KEGIATAN S/D Dengan Tahun (n-3)2022		Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023			
			4	Rp	5	Rp	6	Rp	7	Realisasi Renja Per 2
1	2	3	4	Rp	5	Rp	6	Rp	7	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan administrasi, sarana & prasarana perkantoran	100	3.923.733.608	100	515.076.033	100	927.091.800	100	
02	22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	72	1.356.099.600	12	188.330.033	12	217.222.200	12
02	24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	72	2.567.634.008	12	326.746.000	12	709.869.600	12
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	2.215.567.123	100	1.058.677.607	100	895.587.000	100	
02	28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang di pelihara dan di bayarkan naik dan perizinannya	22	1.124.435.079	22	195.784.107	43	267.459.100	43

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Restra Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Target Kineja Hasil program dan Keluaran KEGIATAN S/D Dengan Tahun (n-3)2022					
			4	Rp	5	Rp	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	6	Rp	Realisasi Renja Per 2
1	2	3	4	Rp	5	Rp	6	Rp	7	
15	10	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	24	940.295.143	-	146.865	3	136.960.000	3	
15	11	Pelaksanaan Konsultasi Publik	9	258.794.730	-	13.720.000	2	109.720.000	2	
20		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	9	1.871.244.363	0	121.258.000	1	186.600.000	1	
20	02	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabuapten/Kota	14	14.800.698.443	7	783.355.820	2	1.304.300.600	2	
20	03	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	80%	3.708.513.226	80%	337.008.644	60%	243.356.850	100%	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Restra Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Target Kineja Hasil program dan Keluaran KEGIATAN S/D Dengan Tahun (n-3)2022					
			4	Rp	5	Rp	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	6	Rp	Realisasi Renja Per 2
1	2	3	4	Rp	5	Rp	6	Rp	7	
21	09	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	58	396.115.000	2	114.802.500	10	54.578.400	10
23		Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Nilai Baik bidang ekonomi dan Infastruktur	96,8%	9.546.748.297	96	1.671.270.222	93,4%	2.644.371.500	100%
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Nilai Baik Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	96,8%		96		92,6%		100%
23		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah dengan nilai kualitas perencanaan baik (Gakor Pemerintahan dan pembangunan	299	4.492.660.697	60	970.438.576	44	1.701.229.300	41

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Restra Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Target Kineja Hasil program dan Keluaran KEGIATAN S/D Dengan Tahun (n-3)2022		Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023			
			4	Rp	5	Rp	6	Rp	7	8
1	2	3	4	Rp	5	Rp	6	Rp	7	8
26		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah BidangSDA	100		0	111.306.898	4	118.208.000	4	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	50	1.969.851.243	2	127.602.050	6	204.575.000	6	
26	11	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)	13	830.355.695	3	127.602.050	2	164.881.000	2	
26	12	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	13	165.204.240	9	22.938.900	6	9.426.000	6	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Restra Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Target Kineja Hasil program dan Keluaran KEGIATAN S/D Dengan Tahun (n-3)2022					
			4	Rp	5	Rp	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	6	Rp	Realisasi Renja Per
1	2	3	4	Rp	5	Rp	6	Rp	7	2
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah ringkasan penelitian dan pengembangan tahunan /policy paper	12	1.927.076.000	6	-	13	1.117.618.000	13	
	Penelitian dan pengembangan pertanian perkebunan dan pangan	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan pertanian,perkebunan, pangan					2	369.320.000	2	
	Penelitian dan pengembangan lingkungan hidup	Jumlah hasil dokumen penelitian dan pengembangan lingkungan hidup					2	298.520.000	2	
	Penelitian dan pengembangan perhubungan	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan perhubungan					1	94.320.000	1	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Restra Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Target Kineja Hasil program dan Keluaran KEGIATAN S/D Dengan Tahun (n-3)2022					
			4	Rp	5	Rp	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Rp	Realisasi Renja Per	2
1	2	3	4	Rp	5	Rp	6	Rp	7	
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi dan teknologi yg dijamin	6	1.465.750.000	1	-	1	1.078.003.000	1	
	Penelitian pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	Jumlah dokumen hasil pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi								
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah laporan hasil pelaksanaan deseminasi jenis prosuder dan sesuai metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	6	1.465.750.000	1	245.542.655	1	1.078.003.000	1	

**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL
DAN PERKIRA
BAPPERID!**

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Idikatif (Rp.)
	(2)	3	4	5	6
					Rp 28.495.555.555,0
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	69	Rp 12.396.611.355,0
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat Daerah	Kabupaten Balangan	100%	Rp 384.973.000,0
	Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja murni dan Renja Perubahan Bappedalitbang (dokumen)	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	2 Dokumen	Rp 26.235.000,0
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan DPA	Bappedalitbang Kabupaten	4 Dokumen	Rp 253.558.000,0

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Idikatif (Rp.)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan semesteran	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 Laporan	Rp 14.200.000,0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 Laporan	Rp 7.100.000,0
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi, sarana & prasarana	Bappedalitbang Kabupaten	100%	Rp 646.810.000,0
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 paket	Rp 106.810.000,0

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Idikatif (Rp.)
	Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakandan dan Penggandaan yang disediakan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	12 paket	Rp 91.579.000,0
	Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undagan yang disediakan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	12 dokumen	Rp 16.680.000,0
	Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	12 laporan	Rp 631.289.000,0
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	100%	Rp 217.500.000,0
		Jumlah Unit Sarana Des			

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Idikatif (Rp.)
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	persentase keselarasan usulan masyarakat (musrenbang), usulan DPRD (POKIR), serta keselarasan dokumen perencanaan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	98,8%	Rp 3.587.595.900,0
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah hasil penyusunan perencanaan dan penganggaran dengan nilai yang baik	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	88%	Rp 2.869.580.900,0
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	2	Rp 219.410.000,0
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah berita acara Konsultasi Publik	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	2	Rp 331.997.000,0
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	2	Rp 568.300.700,0

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Idikatif (Rp.)
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan HasilPengendalian Perencanaandan Pelaksanaan Pembangunan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	2	Rp 355.160.000,0
	Monitoring, Evaluasi danPenyusunan Laporan BerkalaPelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan HasilEvaluasi KinerjaPembangunan Daerah	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	10	Rp 77.827.000,0
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian sasarsn kinerja RPJMD	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	93,4%	Rp 5.175.405.800,0
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah perangkat daerah dengan nilai kualitas perencanaan baik	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	46	Rp 2.634.667.000,0
	Koordinasi PenyusunanDokumen PerencanaanPembangunan Daerah(Bidang Pemerintahan/BDPD, RPJMD dan RKDD)	Jumlah	Bappedalitbang Kabupaten	3	Rp 628.066.000,0

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Idikatif (Rp.)
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	3	Rp 95.461.000,0
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	6	Rp 41.450.000,0
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	12	Rp 61.190.000,0

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Idikatif (Rp.)
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	16	Rp 33.342.400,0
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra / renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang perekonomian	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	8	Rp 118.199.000,0
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang sumber daya alam (sda)	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	3	Rp 137.042.400,0
		Jumlah dokumen pengendalian			

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Idikatif (Rp.)
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	6	Rp 18.350.000,0
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi (dokumen pengendalian tahun berjalan dan monev tahun n-2 SKPD) subsidi infrastruktur dan kewilayahan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	12	Rp 32.586.000,0
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra / Renja dengan RKPD/RPJMD bidang infrastruktur	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	4	Rp 226.465.000,0
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renjadengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	2	Rp 1.209.263.000,0

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Idikatif (Rp.)
	Penelitian dan Pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 Dokumen	Rp 180.030.000,0
	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas pelaksanaan an evaluasi penelitian dan pengembangan bidang kelembagaan dan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	3 dokumen	Rp 170.070.000,0
	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	2 Dokumen	Rp 1.400.030.000,0
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi dan teknologi yg di jaring	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 Laporan	Rp 4.773.659.500,0
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Bappedalitbang Kabupaten Balangan	1 Laporan	Rp 4.467.636.500,0

Table
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN
DAN PERKIRAAN
BAPPERIDA K

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Operasi	Mod
	(2)		Rp 27.695.408.755,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja	Rp 11.748.725.455,00	Rp
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 384.973.000,00	Rp
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.235.000	Rp
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA, SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil	252.559.000	Rp

		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik	Rp	646.810.000,00	Rp
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan		106.810.000	Rp
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis		540.000.000	Rp
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik	Rp	866.656.500,00	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		38.402.800	Rp
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		88.705.700	Rp 108
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		91.579.000	Rp
		Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan		16.680.000	Rp
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd		631.289.000	Rp

	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	596.540.070	Rp	322
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Daerah (kinerja program/kinerja urusan)	Rp 3.587.595.900,00	Rp	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase hasil penyusunan perencanaan dan penganggaran dengan nilai baik	Rp 2.869.580.900,00	Rp	
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	219.410.000	Rp	
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	331.997.000	Rp	
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	568.300.700	Rp	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	1.749.873.200	Rp	
		Persentase data dan informasi			

		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai kualitas perencanaan baik (gakor pemerintahan dan pembangunan manusia)	Rp 2.582.406.100,00	Rp 52
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	628.066.000	Rp
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	325.901.000	Rp 52
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	159.895.000	Rp
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	577.632.100	Rp
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang	95.461.000	Rp
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	41.450.000	Rp

		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	55.552.400	Rp
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat t Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	33.342.400	Rp
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra/ renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang perekonomian	118.199.000	Rp
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang SDA yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD,RPJMD,dan RKPD)	137.042.400	Rp
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	244.890.000	Rp
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA	30.233.400	Rp

	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi renstra / renja dengan RKPD /RPJMD Pada bidang kewilayahan	1.109.263.000	Rp	100
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Rp 7.335.942.500,00	Rp	
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Nilai Inovasi SKPD	Rp 7.335.942.500,00	Rp	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah ringkasan penelitian dan pengembangan tahunan/ policy paper	Rp 632.273.000,00	Rp	
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	400.120.000	Rp	
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	232.153.000	Rp	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah ringkasan penelitian dan pengembangan tahunan/policy paper	Rp 179.880.000,00	Rp	

		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	4.467.636.500	Rp
		Penelitian, Pengembangan dan Perekeyasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekeyasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	306.023.000	Rp